



LAPORAN TAHUNAN  
**2020**





# KATA PENGANTAR



Sumber : Arnie Watkins dari Pexel





**Alhamdulillah,** dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tahun 2020, laporan kegiatan ini menuangkan atas keberhasilan pencapaian target-target kegiatan yang dilaksanakan Kemenko Marves pada tahun 2020. Laporan Kegiatan Kemenko Marves ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik guna menerapkan prinsip transparansi dan bentuk akuntabilitas Kemenko Marves kepada publik dalam menjalankan pemerintahan.

Kegiatan yang disajikan dalam laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pada struktur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, pada saat ini Kemenko Marves terus melakukan pembenahan terhadap organisasi untuk mendukung tugas baru bidang kemaritiman dan investasi yang lebih luas dengan perluasan jumlah K/L yang dikoordinasikan. Dengan demikian maka perencanaan program dan kegiatan yang efektif terus diupayakan sehingga menghasilkan kinerja yang menguatkan kedua isu yang dikoordinasikan yaitu kemaritiman dan investasi. Laporan Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Marves bersama pemangku kepentingan untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan kontribusi pemikiran guna tersusunnya laporan kegiatan ini. Semoga Kemenko Marves dapat terus bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia yang mendukung Visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong sesuai dengan harapan kita semua. Semoga


Jakarta, Februari 2021  
Sekretaris Kementerian Koordinator

**Agung Kuswandono**

# IKHTISAR EKSEKUTIF







**A**rah kebijakan Kemenko Marves dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan Kemenko Marves untuk jangka waktu lima tahun (2020-2024) akan diimplementasikan melalui aktualisasi 5 kebijakan pokok di bidang Kemaritiman dan peningkatan dukungan kesekretariatan, yakni:

- Pembangunan Kedaulatan Maritim;
- Pembangunan berbasis Negara Kepulauan;
- Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan;
- Penguatan Industri dan Jasa Kemaritiman;
- Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pada Tahun 2020, 5 kebijakan pokok tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kemenko Marves. Beberapa hasil pelaksanaan kegiatan sebagai upaya penanganan isu yang menjadi tugas masing-masing unit kerja sebagaimana berikut:

### **Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi**

Hasil kegiatan terkait Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain: 1) Telah dirumuskan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tujuh Pilar KKI dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Rencana Aksi KKI dengan capaian; 2) Telah diterbitkannya kebijakan Implementasi Kesepakatan Bersama 8 K/L tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut yaitu Kepmenko No. 158 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka Penegakan Hukum di Laut; 3) Pengembangan Program *Maritime Domain Awareness* dengan dukungan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), Pemerintah Amerika Serikat, dan Pemerintah Perancis yaitu telah dilakukan pembahasan draft kerja sama dan penempatan tenaga ahli dan telah dilaksanakan pelatihan dan pendidikan terkait di Hawaii, Amerika Serikat . 4) Telah mengembangkan aplikasi *open source* dukungan Pelaksanaan program “Satu Juta Nelayan Berdaulat” melalui penerapan aplikasi *Fish On* di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan dukungan data dari K/L teknis untuk menyajikan data potensi penangkapan ikan; 5) telah dilengkapinya persyaratan dokumen Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen barat Sumatera ke *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* (UNCLCS) dan dimasukkan dalam agenda sementara sidang ke-54 Komisi dan dijadwalkan akan diadakan di New York; serta 5) Pengendalian Kebijakan Pengendalian Persiapan Implementasi Bagian Pemisah Lalu-lintas (*Traffic Separation Scheme/TSS*) di Selat Sunda dan Selat Lombok telah dilaksanakan sosialisasi, penyusunan panduan bernavigasi di Selat Sunda dan Selat Lombok, dan pemutakhiran Peta Laut Indonesia versi cetak, serta SOP Kapal Negara Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas.



## Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Hasil kegiatan Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim antara lain: 1) telah disepakati penyelesaian *Management Authority Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk Jenis Ikan di serahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah koordinasi Kemenko Marves; 2) Pengembangan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) telah ditetapkan lokasi pembangunan Sentra Industri Kelautan dan Perikanan di Natuna Utara dan telah ditetapkan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Bertaraf Internasional di Ambon; 3) dalam hal Penataan Lahan Garam di NTT Kemenko Marves bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR) bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan agraria terkait persoalan lahan yang akan dijadikan ladang garam dengan masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT); 4) telah ditetapkan 5 lokasi labuh jangkar (Tanjung Balai Karimun, Nipah Transit, Pulau Galang, Batu Ampar dan Kabil) dan pencabutan lokasi lainnya melalui Kep. Menhub Nomor KM No 149 dan 150 Tahun 2020 (Area Selat Durian) dan Pushidros TNI AL juga sudah melakukan perbaikan peta laut Indonesia Pengelolaan Kawasan Labuh Jangkar di Perairan Kepulauan Riau dan pencabutan lokasi lainnya; dan 5) Penguatan *Road Map* Perikanan Budidaya telah dilakukan Simplifikasi Perizinan Usaha Tambak Udang untuk memacu kemudahan usaha dan investasi tambak udang, baik untuk skala kecil tambak rakyat, maupun skala industri pertambakan juga telah diputuskan 5 Lokasi Prioritas (lokpri) Pengembangan Budidaya Udang dengan *Pilot Project* KKP.

## Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi antara lain: 1) telah dibentuk Tim Dewan Pengarah *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) serta telah menandatangani Kepmenko Nomor 99 Tahun 2020 mengenai *Steering Committee* Percepatan PTPIN; 2) Pemerintah berkomitmen untuk percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan namun sampai dengan tahun 2020 masih dilakukan kajian untuk pemberian stimulus percepatan pembangunan serta berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga terkait penyusunan rencana pembangunan; 3) progres Tol Laut sampai dengan saat ini sudah 95% serta pembahasan revisi Perpres tersebut telah selesai; 4) Pelayaran Rakyat capaian kegiatan ini telah mencapai 95% dengan adanya Rancangan Perpres Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; 5) telah diakomidirnya Pembangunan Wilayah Batam-Bintan sebagai infrastruktur prioritas Kepri dan sudah masuk dalam RPJMN 2020 s/d 2024 oleh Renstra Kementerian; 6) Pengendalian Transportasi dalam rangka penanganan COVID-19 Kemenko Marves telah mengeluarkan Kebijakan Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada kegiatan transportasi di Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian; 7) Pengembangan Pelabuhan Patimban, telah dilakukan *softlaunching* dan pengoperasian pelabuhan (car terminal) oleh presiden RI; 8) Pengembangan dan Penggunaan Aspal Buton, penyerapan penggunaan Aspal Buton di 25 Provinsi hingga bulan November 2020 mencapai 4.242.871 ton untuk penanganan jalan sepanjang 793 km, dengan progres mencapai 65,84%.





Pengembangan Aspal Buton Full Ekstraksi (Aspal Murni) oleh PT KPA akan memasuki tahap commissioning serta mendorong pembangunan Infrastruktur Pendukung di Pulau Buton, seperti Pembukaan hauling road dari Kabungka ke Lawele, pengembangan Pelabuhan Nambo dan Infrastruktur kelistrikan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait; telah dilakukan koordinasi pengembangan / revitalisasi, penyiapan infrastruktur terhadap 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter; 9) terkait Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah diterbitkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2020 untuk mendukung produk inovasi dalam negeri melalui e-catalogue inovasi, telah dilakukan pengembangan pada sistem e-catalogue sehingga pengadaan "Barang Diwajibkan" dengan nilai TKDN + BMP mencapai 40%; 10) Pengembangan Industri Mobil Listrik Berbasis Baterai, telah disusun kebijakan turunan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan yang berjumlah 5 Peraturan Menteri, 1 Permenko, 1 Kepmenko dan 2 Peraturan Gubernur (Bali dan DKI Jakarta).

### **Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan antara lain: 1) Pengelolaan Lahan Gambut telah dilaksanakan monev restorasi gambut di beberapa provinsi prioritas (Riau, Kalimantan Tengah), berkoordinasi lebih lanjut dengan KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Badan Informasi Geospasial terkait percepatan penyelesaian Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan akan melaksanakan Sosialisasi penyusunan RPPEG provinsi; 2) Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, capaian yang telah dilakukan yaitu pencabutan Permendag Nomor 15/2020 dan diganti dengan Permendag Nomor 74/2020 dan PermenLH K Nomor P.30/2016 juga direvisi dan diganti dengan PermenLH K Nomor P.21/2020; 3) Penanganan dan Pengendalian DAS Citarum telah dilaksanakan Reviu Rencana Aksi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019 - 2025 serta adanya usulan mengenai Program air bersih Metropolitan Bandung menjadi bagian rencana aksi PPK DAS Citarum; 4) Pengelolaan Danau Prioritas, saat ini proses review masukan K/L terhadap Rancangan Perpres Danau Prioritas oleh Sekretariat Kabinet

Sumber : <https://satunusantaranews.co.id/>



yang selanjutnya akan disahkan; 5) Pengendalian Penanganan Sampah Laut, telah dilakukan Koordinasi lintas kementerian yang berada di dalam Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut untuk perhitungan formulasi perhitungan sampah laut *land-based* dan *sea-based* dengan kompilasi angka yang didapatkan dari masing - masing K/L dan selanjutnya akan melakukan pemutakhiran data baseline; dan 5) Kebijakan *Carbon Pricing* saat ini Proses penyampaian penyempurnaan RPerpres pada Presiden dan proses pengesahan RPerpres oleh Presiden, serta fase implementasi Perpres.

### **Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Hasil pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain: 1) terkait dengan pelaksanaan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenko Marves telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya: Pembahasan perkembangan Aksesibilitas Darat di Labuan Bajo, Rakor Pembahasan Perkembangan Penyusunan Draft Rancangan Perpres Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara dsb; 2) Peningkatan Inventarisir Pemberdayaan Informasi Kekayaan Intelektual Parekraf, Khususnya di 5 Destinasi Super Prioritas telah dilaksanakan kerja sama dengan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kekayaan Intelektual terkait Dukungan Percepatan Pendaftaran Indikasi Geografis Kekayaan Intelektual di 5 DPSP dan 15 KEK; 3) Peningkatan Kualitas SDM Pengelola 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas telah dilaksanakan rakor, webinar tentang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta koordinasi lainnya; 4) Pelatihan Online Kartu Pra Kerja, telah dilaksanakan pembahasan *Capacity Building* Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama; 5) Fasilitasi Akses Permodalan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Pariwisata Super Prioritas, telah dilaksanakan koordinasi pembahasan sumber permodalan UMKM sektor Parekraf.

### **Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan antara lain: 1) Kebijakan Pengembangan Perencanaan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha (Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang), telah disusun dokumen naskah kebijakan terkait dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha terkait Investasi Kereta Cepat.; dan 2) Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, telah dikeluarkan Revisi Perpres tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melingkupi proyek terkait hilirisasi mineral, yaitu Perpres 109 Tahun 2020 tentang Revisi Perpres 3 Tahun 2016 PSN dan Perpres ini sudah ditandatangani Presiden.



Beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan Kemanko Marves adalah tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi Kemenko Marves telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja dengan ditetapkannya Permenko Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait isu kebijakan dan program prioritas pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan mengkoordinasikan K/L terkait didukung dengan pagu anggaran sebesar 259.596.417.000 dengan nilai realisasi sebesar 244.408.582.366 sehingga persentase realisasi anggaran 94,15%.



Sumber : HUMAS Kemenko Marves



# DAFTAR ISI

- 2** KATA PENGANTAR
- 4** IKHTISAR EKSEKUTIF
- 10** DAFTAR ISI



## BAB I PENDAHULUAN

- 20** Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
- 21** Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- 21** Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
- 23** Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
- 23** Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 23** Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
- 23** Kesekretariatan



## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- 20** Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
  - 3.1.1. Implementasi Peraturan **25**
  - 3.1.2. Implementasi Kesepakatan Bersama 8 K/L **25**
  - 3.1.3. Pengembangan Program **26**
  - 3.1.4. Dukungan Pelaksanaan **27**
  - 3.1.5. Submisi Landas Kontinen Indonesia **28**
  - 3.1.6. Pengendalian Kebijakan **29**
- 30** Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
  - 3.2.1 Penyelesaian Management Authority **30**
  - 3.2.2 Pengembangan Wilayah **31**
  - 3.2.3 Penataan Lahan Garam di NTT **33**
  - 3.2.4 Pengelolaan Kawasan **33**
  - 3.2.5 Penguatan Road Map Perikanan Budidaya **34**

## 18



## BAB II RENCANA KERJA

- 14** Pengembangan Organisasi
- 16** Profil Pimpinan

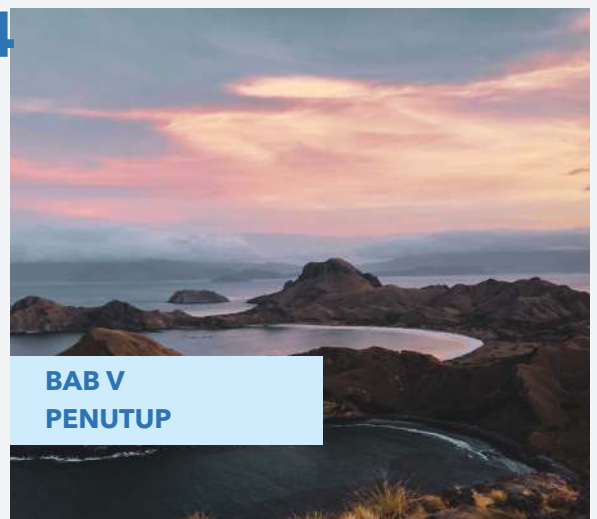
- 25** Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
- 3.3.1. NCICD **35**
- 3.3.2 Jalan Trans pada 18 Pulau **36**
- 3.3.3 Tol Laut **36**
- 3.3.4 Pelayaran Rakyat **37**
- 3.3.5 Pembangunan Wilayah Batam-Bintan **39**
- 3.3.6 Pengendalian Transportasi **39**
- 3.3.7 Pengembangan Pelabuhan **40**
- 3.3.8 Aspal Buton **40**
- 3.3.9 Kawasan Industri **40**
- 3.3.10 TKDN **41**
- 3.3.11 Pengembangan Industri Mobil Listrik **42**
- 43** Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
- 3.4.1 Pengelolaan Lahan Gambut **43**
- 3.4.2 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu **44**
- 3.4.3 Pengendalian DAS Citarum **45**
- 3.4.4 Pengelolaan Danau Prioritas **45**
- 3.4.5 Pengendalian Penanganan Sampah Laut **45**
- 3.4.6 Kebijakan Carbon Pricing **45**
- 46** Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 3.5.1 10 Destinasi Pariwisata Prioritas **46**
- 3.5.2 Peningkatan Inventarisir **46**
- 3.5.3 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola **46**
- 3.5.4 Pelatihan Online Kartu Pra Kerja **47**
- 3.5.5 Fasilitasi Akses Permodalan **47**
- 48** Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
- 3.6.1 Kebijakan Pengembangan Perencanaan **48**
- 3.6.2 Kebijakan Strategi Perencanaan **48**
- 49** Kesekretariatan
- 3.7.1 Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi **49**
- 51** Alokasi dan Realisasi Anggaran

**60**



**BAB IV  
BUDAYA KERJA**

**64**



**BAB V  
PENUTUP**

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

### Daftar Tabel

- Tabel 1. Alokasi dan Anggaran Kemenko Marves Tahun 2020 per Unit Eselon I **53**
- Tabel 2. Alokasi dan Realisasi Kemenko Marves TA 2019 per Jenis Belanja **54**
- Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman Per \ Kegiatan **55**
- Tabel 4. Realisasi Anggaran/Bulan TA. 2019 **58**
- Tabel 5. Realisasi Anggaran Kumulasi TA. 2020 **59**

### Daftar Grafik

- Grafik 1. Komposisi Alokasi Anggaran **54**





# BAB I PENDAHULUAN

**Candi Borobudur - Jawa Tengah**

Foto : Charl Durand dari Pexels

**V**isi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sehingga sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka Kemenko Marves mempunyai misi untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sesuai arah Presiden yang diberikan kepada Menko Marves pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju yaitu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”, menangani hambatan-hambatan investasi, dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemnko Marves fokus pada 6 program prioritas yaitu:



Salah satu faktor yang menguatkan dan menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan kemaritiman dan investasi adalah adanya mandat yang dimiliki oleh Kemenko Marves. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyampaikan visi dan misinya yang harus dikerjakan oleh Kemenko Marves, yaitu mewujudkan Indonesia poros maritim dunia dengan lima pilar yang menyangkut pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumberdaya laut untuk ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim.



## 1.1 Pengembangan Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan pada tahun 2019, Organisasi Kemenko Marves diperkuat menjadi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Kementerian Koordinator dengan 4 (empat) Biro, 6 (enam) Deputi Bidang Koordinasi yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Deputi dan 5 (lima) Asisten Deputi, 4 (empat) Staf Ahli dan 1 (satu) Inspektorat.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga mengkoordinasikan 7 K/L yaitu: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

### 7 KEMENTERIAN / LEMBAGA

DI BAWAH KOORDINASI KEMENTERIAN KOORDINATOR MARITIM DAN INVESTASI



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Kementerian Perhubungan



Badan Koordinasi Penanaman Modal

7 K/L di bawah Koordinasi Kemenko Marves

Organisasi baru ini telah disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI



# 7 UNIT ESELON I





## 1.2 Profil Pimpinan





**NENI HENDIARTI**

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN



**ODO R.M MANUHUTU**

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF



**SEPTIAN HARIAN SETO**

DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN



**TUKUL RAMEYO ADI**

STAFF AHLI MENTERI BIDANG  
SOSIO ANTROPOLOGI



**SUGENG SANTOSO**

STAFF AHLI MENTERI EKONOMI  
MARITIM



**SAHAT M. PANGGABEAN**

STAFF AHLI BIDANG  
MANAJEMEN KONEKTIVITAS



**OKTO IRIANTO**

STAFF AHLI BIDANG  
HUKUM LAUT





## **BAB II RENCANA KERJA**

**Danau Toba - Sumatera Utara**  
Foto : HUMAS Kemenko Marves



**R**encana Kerja Kemenko Marves memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kemenko Marves selama Tahun 2020. Rencana kerja merupakan wujud upaya Kemenko Marves dalam pencapaian visi dan misi yang termuat dalam Rencana Strategis. Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah:

**Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita, maka misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Dalam mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:


- Misi 01 Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Misi 02 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- Misi 03 Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Misi 04 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Misi 05 Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.



Tujuan pembangunan Kemaritiman dan Investasi adalah:

- ✓ Meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat;
- ✓ Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekonomian nasional;
- ✓ Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur;
- ✓ Meningkatkan tatakelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kemaritiman sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka sasaran pembangunan kemaritiman dan investasi Indonesia dalam jangka menengah tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

- 
- Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional;
  - Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis;
  - Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;
  - Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam;
  - Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara

Dalam mendukung sasaran pembangunan tersebut, maka Rencana Kerja Tahun 2020 yang terdiri dari program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebagai berikut:

## 2.1. Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

- 2.1.1 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan rencana aksi KKI
- 2.1.2 Implementasi Kesepakatan Bersama 8 K/L tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut
- 2.1.3 Pengembangan Program *Maritime Domain Awareness* dengan dukungan dari UNODC, Pemerintah Amerika Serikat, dan Pemerintah Perancis
- 2.1.1 Evaluasi dan Monitoring Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) K/L di lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 2.1.2 Dukungan Pelaksanaan program "Satu Juta Nelayan Berdaulat" melalui penerapan aplikasi *Fish On* di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur
- 2.1.3 Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen barat Sumatera ke *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* (UNCLCS)

- 2.1.1 Dukungan Pelaksanaan program “Satu Juta Nelayan Berdaulat” melalui penerapan aplikasi *Fish On* di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur
- 2.1.2 Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen barat Sumatera ke *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* (UNCLCS)
- 2.1.3 Pengendalian Kebijakan Pengendalian Persiapan Implementasi Bagian Pemisah Lalu-lintas (*Traffic Separation Scheme/TSS*) di Selat Sunda dan Selat Lombok

## 2.2. Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

- 2.2.1 Penyelesaian *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk Jenis Ikan
- 2.2.2 Pengembangan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*)
- 2.2.3 Penataan Lahan Garam di NTT
- 2.2.4 Pengelolaan Kawasan Labuh Jangkar di Perairan Kepulauan Riau
- 2.2.5 Penguatan *Road Map* Perikanan Budidaya

## 2.3. Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

- 2.3.1 *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD)
- 2.3.2 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan
- 2.3.3 Tol Laut
- 2.3.4 Pelayaran Rakyat
- 2.3.5 Pembangunan Wilayah Batam-Bintan
- 2.3.6 Pengendalian Transportasi dalam rangka penanganan COVID-19
- 2.3.7 Pengembangan Pelabuhan Patimban
- 2.3.8 Pengembangan dan Penggunaan Aspal Buton
- 2.3.9 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter
- 2.3.10 Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 2.3.11 Pengembangan Industri Mobil Listrik Berbasis Baterai











## **2.4. Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan**

- 2.4.1 Pengelolaan Lahan Gambut
- 2.4.2 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
- 2.4.3 Penanganan dan Pengendalian DAS Citarum
- 2.4.4 Pengelolaan Danau Prioritas
- 2.4.5 Penanganan Sampah Laut
- 2.4.6 Kebijakan *Carbon Pricing*

## **2.5. Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

- 2.5.7 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
- 2.5.8 Peningkatan Inventarisir Pemberdayaan Informasi Kekayaan Intelektua Parekraf, Khususnya di 5 Destinasi Super Prioritas
- 2.5.9 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas
- 2.5.10 Pelatihan Online Kartu Pra Kera
- 2.5.11 Fasilitasi Akses Permodalan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Pariwisata Super Prioritas

## **2.6. Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**

- 2.6.1 Pengembangan Perencanaan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha (Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang)
- 2.6.2 Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirasi Mineral dan Batu Bara

## **2.7. Kesekretariatan**

- 2.7.1 Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi





THE MANDALIK  
Kuta Lombok

# BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

**The Mandalika - Nusa Tenggara Barat**

Foto : HUMAS Kemenko Marves



### 3.1. Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

#### 3.1.1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan rencana aksi KKI

Menindaklanjuti capaian kerja pada tahun 2019, fokus pada penyusunan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode ke-2 Tahun 2020-2024. Berikut ini adalah Capaian Kerja Tahun 2020:

- a. Draf Peraturan Presiden Rencana Aksi KKI 2020-2024 sudah selesai dibahas oleh Tim Teknis yang terdiri Kemenko Marves, KKP, Kementerian PPN/Bappenas, KSP dan Setkab, draf lampiran masih dalam proses penyusunan sebelum berlanjut ke tahap harmonisasi di Kemenkumham dan Tim Teknis Internal telah melakukan reuiu 431 kegiatan dari 34 K/L yang telah mengirimkan surat konfirmasi resmi dari total 44 K/L penanggung jawab.
- b. Telah dirumuskan sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tujuh Pilar KKI dan Pada telah disusun narasi untuk tiap-tiap tabel per-Pilar dalam Lampiran RPerpres Renaksi KKI 2020-2024.
- c. Selanjutnya dilakukan finalisasi di tingkat Kemenko Marves sambil menunggu terbitnya izin prakarsa dari Presiden, selanjutnya dilakukan proses harmonisasi di Kemenkumham.

#### 3.1.2. Implementasi Kesepakatan Bersama 8 K/L tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut

Kemenko Marves sebagai koordinator dan akseptator program, melakukan penguatan **Indonesia Maritime Information Center (IMIC) Bakamla** untuk menjadi **FUSION CENTER/** pusat penyedia data dan informasi keamanan di laut dan juga Juga dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas K/L, Kemenkomarves bekerja sama dengan *the Centre of Humanitarian Dialogue (HD)* menyelenggarakan program "**Maritime Law Enforcement Table-Top Exercise**" (TTX) dengan peserta kegiatan yang berasal dari organisasi Pemerintah lintas Kementerian dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Cina. Output yang diharapkan adalah adanya komitmen kerja sama dan koordinasi tiap instansi terkait pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut, terbitnya SOP pertukaran data dan informasi yang telah disepakati, dan adanya rekomendasi penyempurnaan integrasi data dan informasi.

Capaian Kerja Tahun 2020 untuk koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kebijakan Implementasi Kesepakatan Bersama adalah sudah diterbitkannya Kepmenko No. 158 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka Penegakan Hukum di Laut.



Pada tahun 2020 juga telah disepakati beberapa SOP yang berkaitan dengan Keamanan Laut, adalah sebagai berikut:

- SOP Kejahatan Pembuangan Limbah Pencemaran Lingkungan atau Limbah Berbahaya;
- SOP Kejahatan Perdagangan Benda Cagar Budaya Bawah Air;
- SOP Penyelundupan Ammonium Nitrat dan Potassium;
- SOP Penambangan Timah Lepas Pantai Ilegal;
- SOP Export Ilegal Merkuri;
- SOP Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia; dan
- SOP Pergerakan Ilegal Hasil Pertanian dan Kehutanan



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian implementasi Kesepakatan Bersama 8 K/L tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum Laut adalah adanya perbedaan sistem pada masing-masing K/L terkait hal ini serta harus dilakukan kembali penyamaan visi antar K/L agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

### 3.1.3 Pengembangan Program Maritime Domain Awareness dengan dukungan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Pemerintah Amerika Serikat, dan Pemerintah Perancis

*Maritime Domain Awareness* merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kejadian-kejadian di laut dan kawasan pantai serta mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Diharapkan terbangunnya pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya sehingga setiap kejadian yang mengancam keamanan maritim dapat direspon dengan cepat. Oleh karena itu, Kemenko Marves telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan dengan Kementerian Lembaga terkait untuk membahas *Term of Reference* Kerja sama Indonesia - Perancis terkait Program *Maritime Domain Awareness*. Berikut ini Capaian Kerja Tahun 2020 terkait hal tersebut, antara lain:

- a. Telah dilakukan pembahasan draft kerja sama dan penempatan tenaga ahli, dokumen tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Perancis untuk meminta tanggapan.
- b. Telah dilaksanakan pelatihan dan pendidikan terkait di Hawaii, Amerika Serikat.

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini adalah belum adanya MoU terkait bilateral *maritime dialogue* antara Indonesia-Perancis sebagai payung hukum pelaksanaan kerjasama antara Indonesia-Perancis. Pada tahun 2020, Kementerian Luar Negeri sudah melakukan pembahasan internal tentang draf kerja sama Indonesia-Perancis dan menunggu respon dari Perancis.

### **3.1.4 Dukungan Pelaksanaan program “Satu Juta Nelayan Berdaulat” melalui penerapan aplikasi *Fish On* di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur**

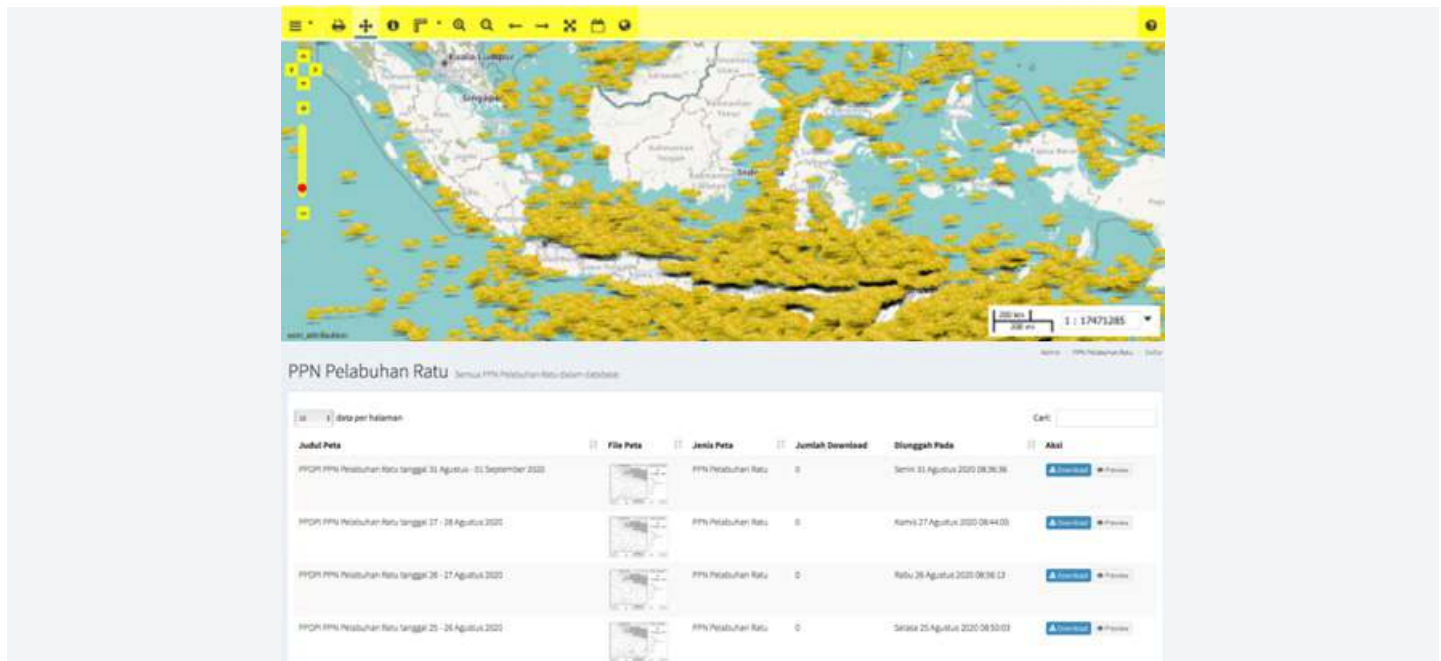
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim & Energi mengembangkan aplikasi *open source* melalui kerja sama dengan tim ahli pemrograman dan dukungan data dari K/L teknis untuk menyajikan data potensi penangkapan ikan kepada nelayan dalam rangka peningkatan ketahanan masyarakat pesisir dalam aspek ekonomi. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim telah melaksanakan Sosialisasi Program Satu Juta Nelayan Berdaulat di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dan telah dilakukan serangkaian kegiatan simulasi dengan melibatkan nelayan dan OPD yang terkait di Pemerintah Daerah. Kemenko Marves juga berkoordinasi dengan K/L terkait (LAPAN, BROL KKP BMKG, dan BPPT) dalam rangka pengintegrasian sistem untuk meningkatkan akurasi pendeteksian ikan. Telah dilakukan evaluasi uji coba penggunaan aplikasi, disimpulkan bahwa program Sejuta Nelayan Berdaulat tidak berjalan secara maksimal dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut terutama validasi data penginderaan jauh yang dimiliki oleh LAPAN, KKP dan BMKG.

Kendala yang dihadapi dalam dukungan pelaksanaan program “Satu Juta Nelayan Berdaulat” antara lain Pandemi Covid-19 menyebabkan tim teknis tidak dapat melakukan kalibrasi ke lapangan secara langsung, sehingga menghambat progres pengembangan dan deployment dan uji coba aplikasi. Investasi gerai nelayan pun mengalami kendala terkait sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang mengarah ke motif komersil sehingga tidak fokus dalam pengembangan program yang memberdayakan masyarakat dan nelayan tradisional.





### 3.1.5 Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen barat Sumatera ke *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* (UNCLCS)



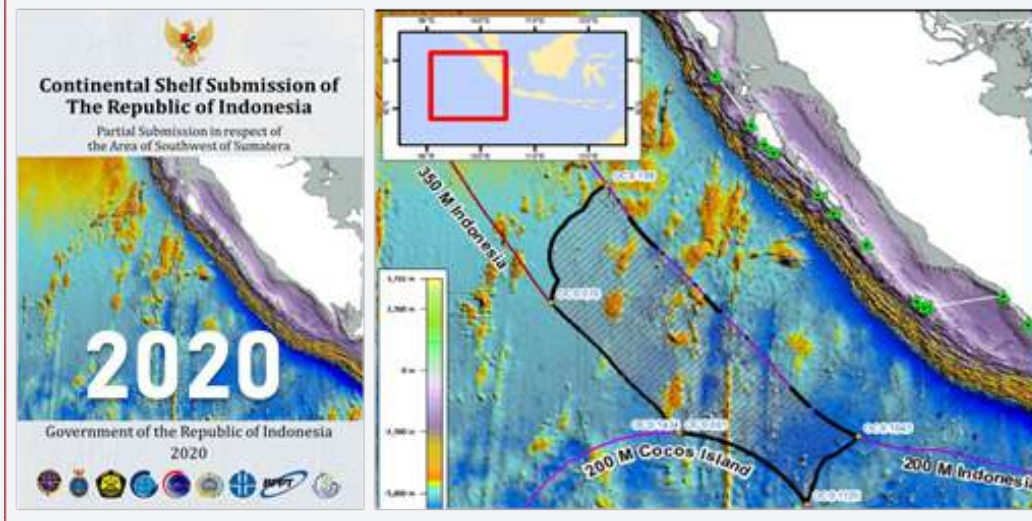
Indonesia mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 Mil laut, kurang lebih mencakup area seluas 211.397,7 km<sup>2</sup> di barat daya Pulau Sumatera pada *Investigator Fracture Zone* dan *Wharton Fossil Region*. Hal ini merupakan bagian dari hak dan kewenangan Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*). Sesuai ketentuan Konvensi tersebut, negara pihak Konvensi dapat mengajukan klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, hingga sejauh-jauhnya 350 Mil laut, dari garis pangkal apabila diyakini dan dapat dibuktikan secara ilmiah dihadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB bahwa area yang diklaim merupakan kepanjangan alamiah dari daratan negara tersebut.

Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil laut untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen submisi kepada PBB dan mengawal klaim Indonesia hingga terbitnya rekomendasi final PBB. Tim juga mendapat mandat untuk menyiapkan data teknis serta membuka komunikasi dengan negara tetangga yang memiliki klaim tumpang tindih/bersebelahan dengan Indonesia.

Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil laut dikoordinasikan oleh Kemenko Marves dan beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL.

Pada tanggal 28 Desember 2020, Dokumen submisi telah disampaikan ke Sekretariat UNCLCS melalui PTRI New York. Pemerintah RI menunggu UNCLCS menyatakan bahwa seluruh persyaratan dokumen telah lengkap untuk kemudian dapat dilanjutkan ke agenda presentasi delegasi RI atas klaim yang diajukan langsung dihadapan sekretariat UNCLCS yang dimasukkan dalam agenda sementara sidang ke-54 Komisi dan dijadwalkan akan diadakan di New York dari 6 Juli hingga 20 Agustus 2021.

## NEXT INDONESIA CONTINENTAL SHELF'S SUBMISSION



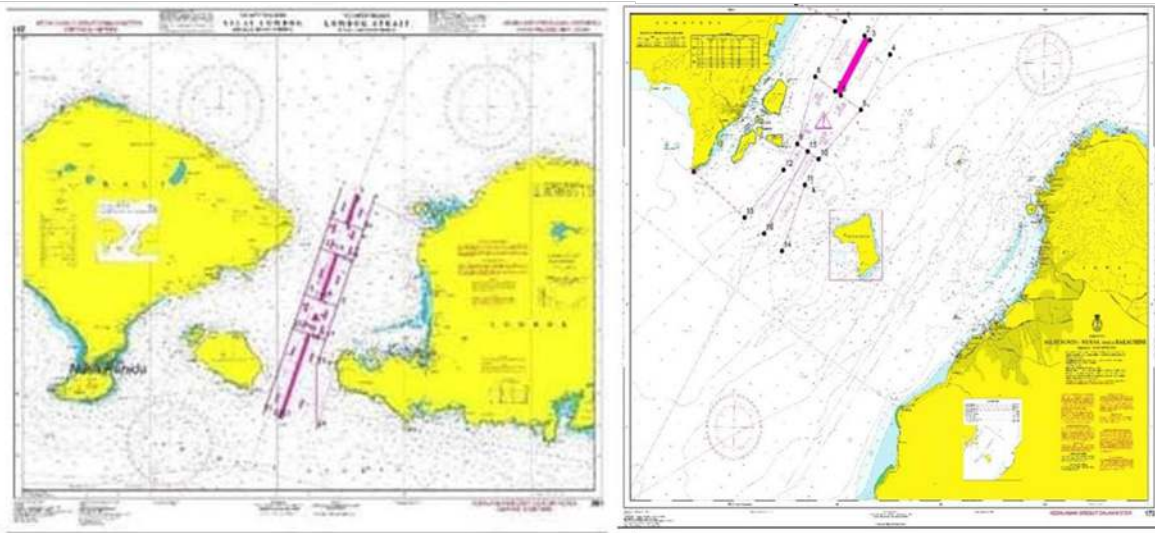
### 3.1.6 Pengendalian Kebijakan Pengendalian Persiapan Implementasi Bagian Pemisah Lalu-lintas (*Traffic Separation Scheme/TSS*) di Selat Sunda dan Selat Lombok

Sebagai poros maritim dunia, Indonesia harus berperan terhadap peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Oleh sebab itu, penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok harus didukung oleh semua pihak agar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mampu mengangkat nama Indonesia di kancah pergaulan internasional khususnya di sektor maritim dunia.

Rangkaian program pengendalian persiapan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok telah selesai dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi dan mengeluarkan Surat Keputusan antara lain Sosialisasi KM 130/2020 mengenai penerapan TSS Selat Sunda pada komunitas industri perikanan tangkap dan industri pelayaran, Sosialisasi KM 129/2020 mengenai penerapan TSS Selat Lombok pada komunitas industri perikanan tangkap dan pelayaran, Penerbitan Surat Edaran IMO No. COLREG.2/Circ.74 dan No. SN.1/Circ.337, Penyusunan Panduan Bernavigasi di Selat Sunda dan Selat Lombok, pemutakhiran Peta Laut Indonesia No. 170 dan No. 291 versi cetak dan elektronik, Penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 129 tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 130 tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda, dan Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No KP.531/DJPL/2020 dan KP.533/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kapal Negara Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada Bagan Pemisah Lalu Lintas di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Sejak bulan Juli 2020, Bagan Pemisah Lalu Lintas di Selat Sunda dan Selat Lombok telah diimplementasikan secara penuh dan direkomendasikan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya berupa pengembangan potensi ekonomi pada daerah sekitar Selat Sunda dan Selat Lombok.





### 3.2 Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

#### 3.2.1. Penyelesaian *Management Authority (MA) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* untuk Jenis Ikan

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri, telah disepakati bahwa *Management Authority (MA)* jenis ikan di serahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah koordinasi Kemenko Marves. Hal ini berdasarkan atas agar tidak terpisahkan dan dalam satu pengelolaan hulu-hilir sumber daya ikan secara lestari yang sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009. Sekretariat CITES Internasional juga telah memperbaharui data *Management Authority* CITES pada website CITES ([www.cites.org](http://www.cites.org)) dengan pembaharuan KKP sebagai MA CITES untuk Jenis Ikan.

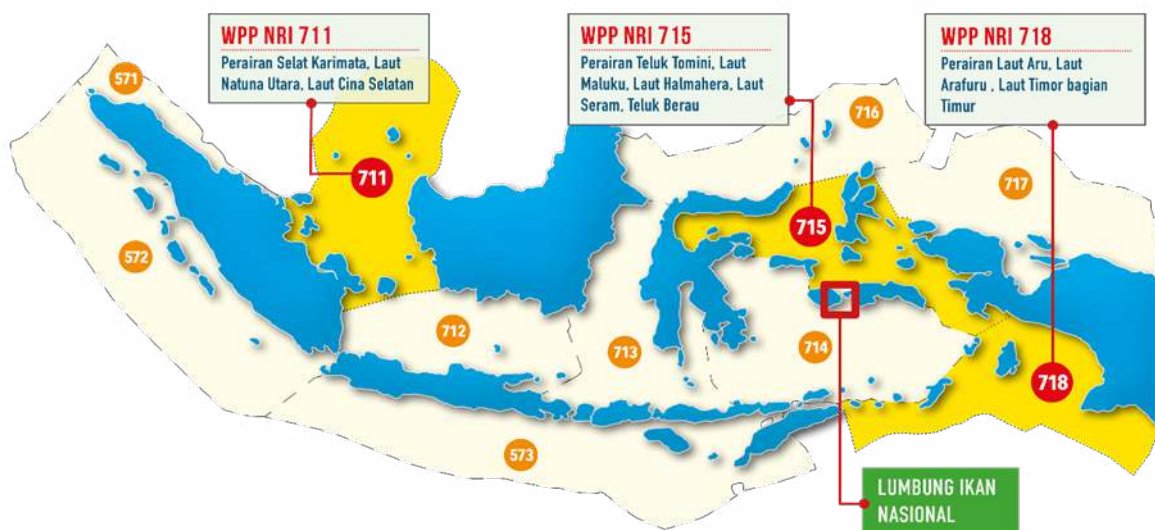
Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditetapkan diagram kerja MA CITES untuk jenis ikan khususnya dalam proses perizinan dan melakukan revisi atas regulasi Permendag Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES. Namun karena belum disepakatinya batas waktu masa transisi MA CITES Jenis Ikan maka menjadi kendala dalam penyelesaian *Management Authority (MA) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* untuk Jenis Ikan.

### 3.2.2 Pengembangan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*)

WPP adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE Indonesia. Pengembangan WPP ini perlu dilakukan berdasarkan perspektif based ekonomi, yaitu frame pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan baik unsur tangkap, *mariculture*, konservasi, pengawasan, dan jasa kelautan. WPP based ekonomi diperlukan sebagai dasar dalam menyiapkan platform pembangunan kelautan dan perikanan yang terukur mulai dari stok, area budidaya, efektivitas konservasi, pengawasan, industri, dan daya dukung jasa kelautan dalam ruang WPP. Pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dikelompokkan sesuai karakteristik WPP yang dibagi menjadi 11 zona yang meliputi wilayah penangkapan ikan, budidaya ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. Dalam rangka peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan berbasis ekonomi, pada RPJMN 2020-2024 diamanatkan melakukan implementasi kelembagaan WPP terintegrasi pada 3 lokasi percontohan. Untuk tahun 2020 ditetapkan di WPPNRI 711, 715, dan 718. Selanjutnya kelembagaan WPP ini pada tahun 2024 diharapkan secara bertahap / trajektori dapat diselesaikan untuk 11 WPP sesuai amanat RPJMN 2020-2024.

Pada tahun 2020, telah ditetapkan lokasi pembangunan Sentra Industri Kelautan dan Perikanan di Natuna Utara dan telah ditetapkan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Bertaraf Internasional di Ambon. Selain itu, telah terbitnya Surat Menko Maritim dan Investasi Nomor: B-1296/Menko/Marves/PP.00.02/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Model Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus berbasis WPP kepada Menteri KP. Surat tersebut meminta pelaksanaan Pembahasan Teknis dan Usulan Penetapan 3 WPP Percontohan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain belum adanya pengaturan terkait Lembaga Pengelolaan Perikanan WPP yang meliputi operasional kelembagaan, kerangka kerja dan kegiatan pengawasan; belum selesainya kajian akademis dan *Feasibility Study* untuk lokasi spesifik pengembangan 2 WPP Percontohan (WPP 711 di Natuna Utara dan WPP 715 di Pulau Ambon); dan belum ada kegiatan yang spesifik untuk pengembangan WPP 718.





Pengembangan Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan:

2

Pengembangan Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan

Penetapan 3 WPP (711, 715 dan 718) Pilloting sebagai Penyokong Pemulihan Ekonomi Nasional diputuskan dalam RAKOR Tingkat Menteri pada Tanggal 25 dan 28 Agustus 2020

Lokasi Pengembangan WPP di Indonesia :

NATUNA UTARA SEBAGAI SENTRA INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU			MALUKU-LIN : DI AMBON SEBAGAI SENTRA PELABUHAN PERIKANAN BERTARAF INTERNASIONAL TERINTEGRASI DENGAN FISH MARKET			PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WPPNRI 718 DENGAN TARGET PELAGIS BESAR, UDANG DAN CUMI		
WPP 711			WPP 715			WPP 718		
NO	INDIKASI KEGIATAN	LOKASI	NO	KEGIATAN	LOKASI	NO	KEGIATAN	LOKASI
1	Pembangunan SKPT (baru)	Natuna Utara	1	Pusat Perikanan Terpadu Maluku	Pulau Ambon	1	Pengembangan SKPT	Merauke, Moa, Saumlaki, Mimika
2	Eco Fishing Port	PPN Sungailiat	2	Eco Fishing Port	PPS Bitung	2	Integrated Fishing Ports and International Fish Markets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Ukurlaran Saumlaki (major project RPJMN)</li> <li>• PPN Merauke</li> </ul>
3	Integrated Fishing Ports and International Fish Markets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagansiapi-api (major project RPJMN)</li> <li>• PPN Pemangkat, PPN Tanjung Pandan, PPP Teluk Batang, PP Sungsang</li> </ul>	3	Integrated Fishing Ports and International Fish Markets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likupang (major project RPJMN)</li> <li>• PPN Ternate, PPN Kwandang,</li> </ul>			
4	Pengembangan kawasan budidaya kerapu, bawal bintang, lobster, kakap, dan rumput laut	Kep. Riau	4	Pengembangan SKPT	Morotai	3	Pengembangan kawasan budidaya rumput laut, kerapu, lobster, dan kakap	Papua
5	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	TWP (Taman Wisata Perairan) Kep. Anambas	5	Pengembangan kawasan budidaya rumput laut, kerapu, lobster, kakap, dan kekerangan	Maluku Maluku Utara	4	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	SAP (Suaka Alam Perairan) Anu Bagian Tenggara
			6	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	SAP (Suaka Alam Perairan) Raja Empat, SAP Waigeo Sebelah Barat			

### 3.2.3 Penataan Lahan Garam di NTT

Kemenko Marves bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR) bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan agraria terkait persoalan lahan yang akan dijadikan ladang garam dengan masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan dari Swasembada Garam Nasional sendiri adalah untuk mengurangi ketergantungan impor garam dan mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat terutama bagi masyarakat petambak garam. Pada tahun 2020 telah terbit Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 94/HPL/KEM-ATR/BPN/VIII/2019 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Prov NTT atas Tanah Seluruhnya Seluas 1.693,9824 Ha.

Sudah ada 4 Perusahaan telah bekerjasama dengan Pemprov NTT (Total 1.425 Ha) yaitu PT. Timor Livestock Lestari 600 Ha, PT. Timor Garam Lestari 475 Ha, PT. Tjakrawala Timor Sentora 475 Ha, dan PT. Cladtek Asia Spool Base 50 Ha. Pada tahun 2020 juga terdapat 2 Perusahaan dalam proses melaksanakan kontrak Kerjasama dengan Pemprov NTT (Total 350 Ha) yaitu PT. Pariwisata Timor Megah 50 Ha dan PT. Garam Indo Nasional 300 Ha.

Kendala yang dihadapi dalam pengendalian kebijakan penataan lahan garam di NTT antara lain adanya perusahaan yang telah mendapatkan kontrak kerja-sama namun belum melakukan pekerjaan di lapangan dan Pemprov NTT belum menyelesaikan pemrosesan izin HGU terhadap 3 perusahaan garam yang telah bekerjasama.

Selanjutnya perlu dilaksanakan monitoring kepada Pemprov NTT atas hasil koordinasi mengenai luas lahan, kepastian lokasi perusahaan yang akan diberi HGU, dan perizinan serta melakukan monitoring produksi dan pemrosesan izin HGU terhadap 3 perusahaan yang telah bekerjasama.

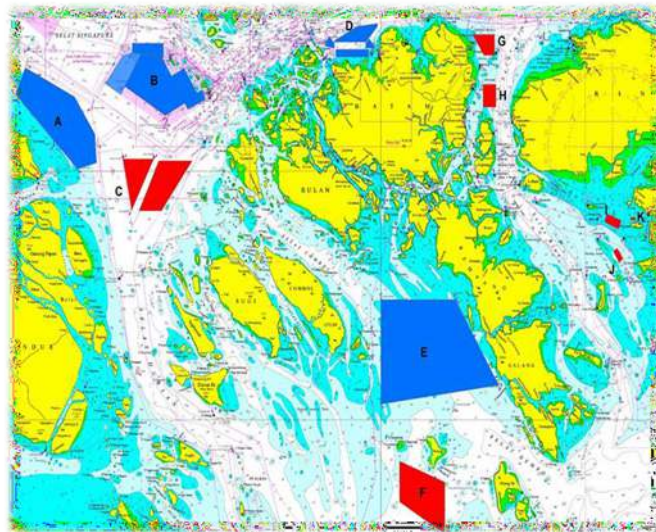
Panen garam bersama Gubernur NTT dan Menko Marves di agendakan pada Bulan Juni 2021 di lahan ekstentifikasi garam Teluk Kupang NTT.

### 3.2.4 Pengelolaan Kawasan Labuh Jangkar di Perairan Kepulauan Riau

Pada tahun 2020 telah ditetapkan 5 lokasi labuh jangkar (Tanjung Balai Karimun, Nipah Transit, Pulau Galang, Batu Ampar dan Kabil) dan pencabutan lokasi lainnya melalui Kep. Menhub Nomor KM No 149 dan 150 Tahun 2020 (Area Selat Durian) dan Pushidros TNI AL juga sudah melakukan perbaikan peta laut Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2020 juga telah ditetapkan SOP Pengelolaan dan Pengoperasian Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Kepulauan Riau.

Kendala yang dihadapi dalam rekomendasi pengendalian kebijakan pengelolaan kawasan labuh jangkar di perairan Kepulauan Riau adalah belum terbit peraturan penunjukkan operator labuh jangkar Kabil dan Berakit dari Kementerian Perhubungan, selanjutnya dalam mengatasi kendala tersebut adalah akan dilakukan sosialisasi kepada pemerintah maupun swasta setelah dilakukan penetapan dan pencabutan lokasi labuh jangkar oleh Kemenhub dan Pushidrosal.





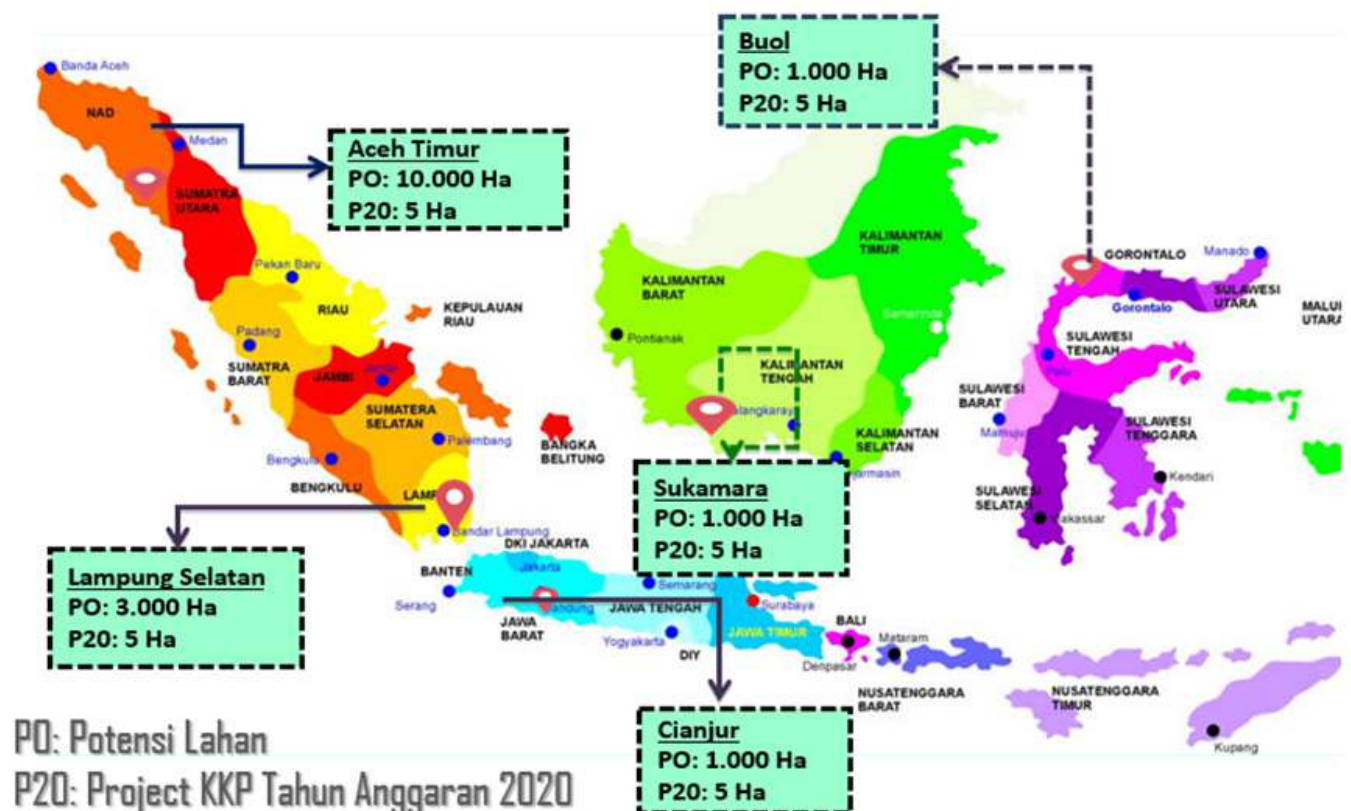
### 3.2.5 Penguatan Road Map Perikanan Budidaya

Pada tahun 2020 ditekankan pada pengembangan komoditas Udang, untuk dibuat *Road Map* peningkatan produksi, revitalisasi tambak, dan pembuatan model *upgrading* teknologi produksi udang di 2 lokasi super prioritas di Aceh Timur dan Lampung. Telah diputuskan 5 Lokasi Prioritas (lokpri) Pengembangan Budidaya Udang dengan *Pilot Project* KKP di masing-masing lokasi 5 Ha.

Dalam pengendalian kebijakan penguatan *road map* perikanan budidaya juga telah dilakukan Simplifikasi Perizinan Usaha Tambak Udang untuk memacu kemudahan usaha dan investasi tambak udang, baik untuk skala kecil tambak rakyat, maupun skala industri pertambakan. Jenis dan skema perizinan yang semula terdapat 21 izin/syarat dengan berbagai pintu pengurusan, telah disederhanakan menjadi 3 jenis (NIB, persetujuan lokasi dan persetujuan lingkungan dengan 1 pintu melalui OSS). Saat ini sedang dalam proses internalisasi kedalam RPP Turunan UU Cipta Kerja yang dikoordinasikan oleh Kantor Kemenko Perekonomian.

Selama proses penyederhanaan perizinan, Kapolri dan Kemendagri telah menerbitkan Surat Telegram mengenai Moratorium Penindakan terkait Perizinan Tambak udang dan Peningkatan Kenyamanan Berusaha Budidaya Udang.

Salah satu kendala yang di hadapi adalah *Master Plan* dan *Detail Engineering Design* (DED) untuk pengembangan lahan 200 - 1000 Ha di 5 lokasi prioritas masih dalam proses penyelesaian. Sebagai tindak lanjut telah dikirimkan surat kepada Bappenas dan KKP perihal penyediaan pembiayaan untuk penyusunan *Master Plan* kawasan dan memenuhi kebutuhan dan kelayakan alokasi DAK kelautan dan perikanan di lokasi prioritas





### 3.3 Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

#### 3.3.1. *National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)*

Harus disadari bahwa banyak permasalahan di ibu kota ini terkait dengan program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara, oleh karena itu untuk mendukung NCICD harus segera dibentuk Tim Pengarah yang dapat memberikan arahan kepada para Stakeholder terkait dan penyiapan payung hukum regulasi untuk Tim Dewan Pengarah. Payung hukum regulasi perlu dibuat dalam bentuk Kepmenko mengingat regulasi yang dibutuhkan ini sifatnya untuk menaungi suatu Proyek kegiatan dan bukan Program PTPIN secara menyeluruh.

Tim Dewan Pengarah NCICD dibentuk dengan pertimbangan latar belakang ditemukannya berbagai kompleksitasnya permasalahan PTPIN yang melingkupi wewenang Lintas Sektor dan Wilayah, Keputusan yang Mendesak, Kebutuhan Jangka Panjang, dan sekaligus amanat MoU Trilateral tentang NCICD fase-2 saat ini. Selanjutnya, disepakati pula dibentuk Tim Percepatan Penyiapan Perpres NCICD. Pada tanggal 21 Juli 2020 Menko Maritim dan Investasi telah menandatangani Kepmenko Nomor 99 Tahun 2020 mengenai *Steering Committee* Percepatan PTPIN. Tim Pengarah yang diketuai oleh Menko Maritim dan Investasi dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri PUPR.

Saat ini Penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tengah disusun oleh Kementerian PUPR dengan Kemenko Maritim dan Investasi sebagai wakil ketuanya dan akan menetapkan rencana kerja 2021.



### 3.3.2 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan

#### a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pulau Natuna

Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase), Pembangunan Ruas Jalan Teluk Buton Kelarik (Jalan Lingkar Pulau Natuna), dan Pembangunan Jembatan Klarik Cs pada saat ini terkena dampak *refocusing* dan Kemenko Marves berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga dan Pemerintah Daerah terkait dampak *refocusing* dan relaksasi pembangunan jalan trans di tahun 2021.

#### b. Pembangunan Jalan Peninting-Payalaman di Kabupaten Kepulauan Anambas

Pada tahun 2020, progress pembangunan fisik sudah mencapai 60% namun kegiatan ini juga terdampak *refocusing* Covid-19.

#### c. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Pulau Enggano, Prov.Bengkulu

Pemerintah berkomitmen untuk percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan termasuk Pulau Enggano. Pulau Enggano memiliki ruas jalan utama yaitu ruas jalan Banjar Sari-Malakoni-Kahyapu yang menghubungkan dua Pelabuhan utama (Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Kahyapu) di Pulau Enggano. Ruas jalan ini memiliki Panjang 32 km berdasarkan SK Jalan tahun 2019 yang fungsi utama dari ruas jalan ini adalah akses untuk angkutan hasil perkebunan dan lalu lintas umum namun sampai dengan tahun 2020 masih dilakukan kajian untuk pemberian stimulus percepatan pembangunan serta berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga terkait penyusunan rencana pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Enggano.

### 3.3.3 Tol Laut

Salah satu manfaat yang dirasakan oleh negara Indonesia dengan berjalannya program tol laut ini terkandung dalam poin pertama agenda prioritas presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni memperkuat jati diri sebagai negara maritim terbesar di dunia dan manfaat lain yang dapat dirasakan adalah membuat harga kebutuhan bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia merata. Pada tahun ini akan dilakukan kebijakan Revisi Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Progress sampai dengan saat ini sudah 95%, pembahasan revisi Perpres tersebut telah selesai dan sedang proses pemberian paraf di level Menteri untuk semua K/L terkait untuk segera di sahkan.



Foto : <https://pemandangantopbanget.blogspot.com/>



### 3.3.4 Pelayaran Rakyat

Kondisi sarana angkutan laut yang terjadi saat ini adanya keterbatasan kapasitas pelabuhan sehingga saat ini angkutan laut hanya dapat dilayani oleh kapal-kapal berukuran kecil. Oleh karenanya, seringkali tidak memenuhi konsep skala ekonomi (*economic of scale*) dan dirasakan tidak efisien. Kedepan dibutuhkan pengembangan pelabuhan dan fasilitas pendukungnya agar mampu melayani kapal yang berukuran besar sehingga dapat merespons permintaan pasar.

Pada tahun 2020, capaian kegiatan ini telah mencapai 95% dengan adanya Rancangan Perpres Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat yang sedang dalam proses reviu oleh Staf khusus bidang Hukum Kemenko Marves. Capaian tersebut terkendala oleh adanya penambahan pada bagian menimbang yang masih diusulkan untuk menambahkan UU Pelayaran, serta usulan revisi pada Pasal 6.





Foto : Heru Eko Saputro dari Unsplash

### 3.3.5 Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

Pembangunan wilayah Indonesia dengan kondisi alam yang berbeda dengan negara-negara lainnya membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda juga, khususnya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap iklim investasi, selain proses ekspor impor dan kondisi makro ekonomi suatu negara. Infrastruktur juga menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena tingkat elastisitasnya yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan elastisitas yang cukup besar, maka sedikit perubahan dari komponen infrastruktur akan berpengaruh pada nilai PDB.

Pada tahun 2020, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa infrastruktur prioritas Kepri yang sudah masuk dalam RPJMN 2020 s/d 2024 sudah diakomodir oleh Renstra Kementerian. Dokumen studi kelayakan Jembaatan Batam-Bintan dan dokumen lelang sebagai pendukung pengadaan Badan Usaha Pelaksana sedang dalam tahap finalisasi oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR sehingga capaian pada kegiatan ini sebesar 30%.

Kedepan disarankan kepada K/L terkait membuat kajian komprehensif, sehingga bermanfaat bagi daerah mengingat posisi Natuna yang berada di Laut China Selatan memiliki faktor geostrategis baik bagi Indonesia maupun Internasional.

### 3.3.6 Pengendalian Transportasi dalam rangka penanganan COVID-19

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut. Kemenko Marves telah mengeluarkan Kebijakan Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada kegiatan transportasi di Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian.

Namun dalam pelaksanaan pengawasan pengendalian transportasi terdapat banyak kendala antara lain:

- a. Sulitnya menindak kegiatan transportasi di moda darat karena jaringannya terbuka, kendaraan yang dicek meliputi kendaraan pribadi yang jumlahnya banyak dengan dukungan SDM di lapangan yang terbatas serta tidak konsisten
- b. Inkonsistensi dan kurang padunya pemahaman petugas di lapangan yang terdiri dari lintas K/L/I
- c. Biaya tes kesehatan lebih mahal daripada biaya transportasi
- d. Kenakalan maskapai yang menjual seluruh kursi yang tersedia
- e. Syarat dan prosedur pengajuan keluar-masuk daerah tertentu yang berbeda karena setiap daerah kewenangannya masing-masing
- f. Penumpukkan penumpang di KRL
- g. Pengaturan jam kerja kantor yang belum efektif dan kurang sinkron dengan kepentingan di Kementerian lain
- h. Biaya transportasi membengkak
- i. Mencari keseimbangan antara kemampuan keuangan operator dan implementasi protokol kesehatan.

Untuk itu Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat terkait evaluasi pengendalian transportasi darat dan dengan Pemprov DKI untuk Pemerintah Daerah di lingkup Kawasan Jabodetabek serta K/L terkait untuk memecahkan masalah kepadatan transportasi akibat jam kerja dan aktivitas umum masyarakat lainnya.



### 3.3.7 Pengembangan Pelabuhan Patimban

Telah dilakukan *softlaunching* dan pengoperasian pelabuhan (car terminal) oleh presiden RI dan kendala yang dihadapi adalah terdapat kondisi cuaca ekstrem sehingga ada sedikit masalah berkaitan dengan penyelesaian breakwater.

Kemenko Marves akan berkoordinasi, monitoring dan pengendalian guna percepatan pembangunan pelabuhan Tahap II 2021-2024.

### 3.3.8 Pengembangan dan Penggunaan Aspal Buton

Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan Aspal Buton, yang terbaru adalah Permendagri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dimana agar Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan preservasi jalan mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton. Penggunaan Aspal Buton dalam pembangunan jalan di kawasan industri terus di dorong, dengan usaha pilot projectnya yaitu kawasan Industri Palu, dimana pada kawasan tersebut terdapat tenant yang merupakan produsen Aspal Buton (PT Asbuton Jaya Abadi) dan juga hilirisasi Aspal Buton akan terus didorong sehingga penggunaannya tidak terbatas sehingga material untuk pembangunan jalan saja, Kementerian Perindustrian akan membuat pohon industri.

Penyerapan Penggunaan Aspal Buton di 25 Provinsi hingga bulan November 2020 mencapai 4.242.871 ton untuk penanganan jalan sepanjang 793 km, dengan progres mencapai 65,84%. Pengembangan Aspal Buton Full Ekstraksi (Aspal Murni) oleh PT KPA akan memasuki tahap commissioning, commissioning direncanakan berlangsung selama 3 bulan dan pedoman teknis penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan Jalan Nasional hingga Jalan Desa sudah dibuat oleh Kementerian PUPR.

Dilaporkan oleh ASPABI kapasitas produksi berbagai jenis produk aspal buton mencapai 1.484.500 ton/tahun. Tindak lanjut dalam pengembangan dan penggunaan aspal buton adalah mengusulkan supaya Aspal Buton masuk dalam e-catalog dan dimasukkan dalam DAK (Dana Alokasi Khusus). Mendorong pembangunan Infrastruktur Pendukung di Pulau Buton, seperti Pembukaan hauling road dari Kabungka ke Lawele, pengembangan Pelabuhan Nambo dan Infrastruktur kelistrikan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

### 3.3.9 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyiapan infrastruktur dan kerja sama untuk KI Kuala Tanjung dan KI/KEK Sei Mangkei (pengembangan pelabuhan, konektivitas Kuala Tanjung dan Sei Mangkei, ketersediaan listrik yang handal, kerja sama kawasan industri dan pengembangan pelabuhan Zhejiang Seaport-Port of Rotterdam- Pelindo 1, ketenagalistrikan)
- b. Koordinasi penyiapan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang (Tata ruang, ijin pengerukan alur pelayaran dan reklamasi, penyediaan air baku industri di kawasan, ketenagalistrikan)
- c. Koordinasi pengembangan / revitalisasi Kawasan Industri Bintan Aerospace berfokus pada Halal Food Hub, Bandara, Aerospace dan MRO, Offshore Marine Center, dan industri elektronika
- d. Koordinasi penyiapan infrastruktur Kawasan Industri Sadai (kebutuhan air baku, AMDAL Pembangunan Pelabuhan, kebutuhan gas industri)
- e. Koordinasi penyiapan infrastruktur Kawasan Industri Ketapang (kebutuhan infrastruktur jalan yang lebih memadai, sinyal telekomunikasi di kawasan)

- f. Koordinasi penyiapan infrastruktur KI Teluk Weda (alih trase jalan, perijinan tarsus)
- g. Koordinasi penyiapan pengembangan Kawasan Industri Batang (penyesuaian tata ruang, masterplan dan FS)
- h. Koordinasi penyelesaian isu di KEK Kendal (insentif fiskal, ketersediaan air baku, pengembangan pelabuhan, dan kehandalan serta harga listrik dan gas).

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Rapat koordinasi teknis lanjutan untuk mengawal perkembangan masing-masing Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus bersama K/L terkait.

### **3.3.10 Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri telah dilakukan penyelesaian dugaan pelanggaran dalam pengadaan meliputi:

- a. Rekomendasi dalam rangka pemantauan proyek abadi Masela;
- b. Koordinasi dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran proyek Kilang Pertamina RDMP Balikpapan, Lawe-lawe dan Pertamina Hulu;
- c. Koordinasi dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran sistem informasi perpajakan;
- d. Koordinasi dan Pemantauan dalam rangka peningkatan TKDN alat Kesehatan;
- e. Koordinasi dan Pemantauan dalam rangka peningkatan TKDN Energi Baru Terbarukan
- f. Koordinasi dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran P3DN PLTU Batang

Pemantauan Kebijakan dalam rangka mendukung Peningkatan Penggunaan Dalam Negeri (P3DN) sebagai berikut:

- a. Telah diterbitkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2020 untuk mendukung produk inovasi dalam negeri melalui e-catalogue inovasi;
- b. Telah dilakukan pengembangan pada sistem e-catalogue sehingga pengadaan oleh K/L/PD prioritas pertama kepada "Barang Diwajibkan" dengan nilai TKDN + BMP mencapai 40%, baru kemudian produk dengan TKDN + BMP di bawah 40%, dan terakhir produk impor;
- c. Rekomendasi peninjauan kembali Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2019
- d. Mendorong Penggunaan TKDN dijadikan sebagai indikator kinerja Direksi BUMN.
- e. Inisiasi dan Koordinasi Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TKDN sektor ketenagalistrikan

Integrasi Sistem Informasi P3DN melalui:

- a. Peluncuran laman pengaduan P3DN pada situs Web Kemenko Maritim dan Investasi. Laman pengaduan dimaksud dalam proses integrasi dengan Sistem Informasi Kementerian Perindustrian dan akan diintegrasikan dengan sistem Kementerian/Lembaga/Badan Usaha terkait
- b. Integrasi Sistem Informasi pengajuan perizinan importasi secara online dengan Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Teknis lain dalam tahap kajian



### 3.3.11 Pengembangan Industri Mobil Listrik Berbasis Baterai

Telah disusun kebijakan turunan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
- c. Peraturan Menteri Perhubungan No. 44/2020 tentang Pengujian Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik
- d. Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 Tahun 2020, tentang Spesifikasi, Peta jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan TKDN KBLBB
- e. Peraturan Menteri Perindustrian No. 28 Tahun 2020, tentang KBLBB dalam keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Terurai Tidak Lengkap (IKD)
- f. Permenko Marves Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan KBL dan Kelompok Kerja
- g. Kepmenko Marves Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pokja Percepatan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2019 KBL-BB
- h. Peraturan Gubernur DKI Jakarta 3/2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
- j. Pelaksanaan tatacara identifikasi rangka kendaraan dan registrasi (TNKB khusus KBL-BB sudah dilaksanakan kontrak dan sudah dilakukan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia)
- k. Surat Usulan Insentif Bea Masuk CBU KBL Berbasis Baterai bagi Industri KBL yang sedang pada tahap pembangunan industri akan dikirimkan setelah Permenperin ditandatangani
- l. Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor bahan baku baterai lithium dalam tahap finalisasi

Kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program KBL-BB antara lain:

- a. PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang PPn Barang Mewah Kendaraan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/2020 tentang Satuan Biaya Masukan 2020
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 024/4833SJ tentang Percepatan Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan
- d. Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-14/D.03/2020 tentang Dukungan Perbankan dalam Penerapan Progress Percepatan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai
- e. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konversi Sepeda Motor ICE menjadi KBLBB dalam proses harmonisasi di Kemenkumham
- f. Permenperin Nomor 34 Tahun 2017, tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih sedang dilakukan revisi

- g. Pengusulan perubahan PMK Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang
- h. revisi Perka BKPM Nomor 1 Tahun 2019 agar KBLBB Roda-2 masuk dalam Industri Pionir
- i. Sosialisasi agar pengadaan kendaraan operasional menggunakan KBL BB
- j. Usulan SBU penyewaan KBL-BB untuk kepentingan kendaraan operasional perkantoran
- k. KBLI Khusus untuk KBLBB
- l. Surat ke Bappenas tentang kemampuan Industri Nasional KBLBB
- m. PNBP Uji tipe KBLBB diusulkan diturunkan 50%
- n. E-Katalog Inovasi untuk KBL-BB
- o. Standardisasi Baterai KBLBB Rioda-2 (Swap Battery) sudah selesai 12 SNI, masih kurang 1 SNI lagi
- p. Pergub BI tentang DP 0% untuk KBLBB dalam tahap Finalisasi.

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memantau progress penyusunan regulasi maupun kebijakan teknis pada setiap K/L dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai; menginisiasi dan mengkoordinasikan pengusulan perubahan turunan kebijakan yang belum sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 55/2019; mengkoordinasikan industrialisasi KBL-BB bersama Kementerian, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi, dan Industri KBL-BB dalam negeri; dan menginisiasi dan mengkoordinasikan agar katalog inovasi Gesits dan katalog sektoral Kemenhub dapat digunakan secara nasional.

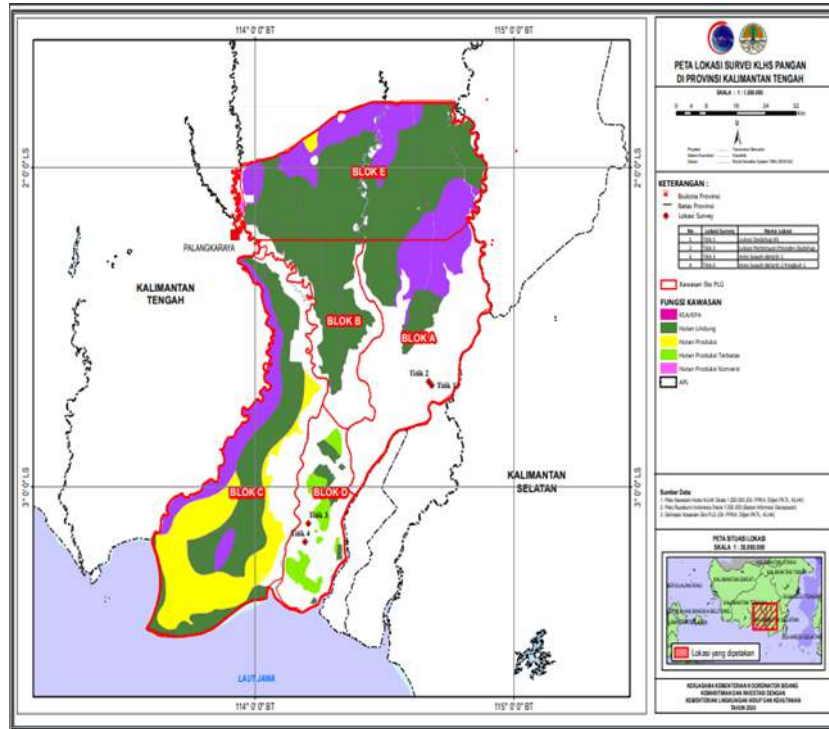
### **3.4 Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan**

#### **3.4.1. Pengelolaan Lahan Gambut**

Kemenko Marves sebagai Kementerian yang membawahi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan memberikan rekomendasi Kebijakan dalam Pengelolaan Lahan Gambut ini, KLHK telah melakukan pemulihan ekosistem gambut di 12 Provinsi dan Badan Restorasi Gambut di 7 Provinsi. Pada tahun 2020 telah terlaksana intervensi restorasi untuk kegiatan *rewetting*, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian per Agustus 2020 seluas 122.000 Ha namun terdapat penurunan target restorasi di tahun 2020 dari 301.800 Ha karena adanya pandemi covid- 19. Dan telah dilakukan inventarisasi pemetaan 123 KHG pada tahun 2020 dengan total capaian inventarisasi 235 KHG skala 1:50.000 s.d tahun 2020.

Telah tersusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPEG) Nasional melalui SK Menteri LHK No. 246 Tahun 2020 Telah dilakukan pemetaan 28 KHG skala 1:50.000 Draf Perubahan Perpres No 1/206 tentang Badan Restorasi Gambut telah diselesaikan dan disampaikan kepada Presiden Telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kemenko Marves antara lain melakukan Monev Restorasi Gambut di beberapa provinsi prioritas (Riau, Kalimantan Tengah), berkoordinasi lebih lanjut dengan KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Badan Informasi Geospasial terkait percepatan penyelesaian Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan akan melaksanakan Sosialisasi penyusunan RPPEG provinsi.



### 3.4.2 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, sistem ini dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Permendag Nomor 15/2020 dicabut dan diganti dengan Permendag Nomor 74/2020 dan PermenLH K Nomor P.30/2016 juga direvisi dan diganti dengan PermenLH K Nomor P.21/2020.

- a. Permendag Nomor 74/2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan mulai berlaku tanggal 25 Oktober 2020 dan telah disosialisasi perdana ke asosiasi industri kehutanan pada tanggal 20 November 2020 di Bogor.
- b. PermenLHK Nomor P.21/2020 terkait teknis pelaksanaan SVLK mulai berlaku tanggal 2 Desember 2020 dan telah disosialisasikan bersamaan Permendag Nomor 74/2020 pada 4 kota sentra usaha mikro kecil dan menengah yakni Jepara, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya tanggal 24-27 November 2020.

Ada 2 kegiatan yang direncanakan menjadi *kick off* kegiatan pada tahun 2021 yaitu regulasi pengawasan dan monitoring dari hulu ke hilir produk industri kehutanan. Pengawasan dan monitoring dapat meningkatkan PNPB dari sektor kehutanan melalui tertib izin pemanfaatan hasil hutan dan nilai dan jumlah ekspor produk industri kehutanan dapat ditingkatkan dengan regulasi yang mendorong peremajaan mesin plywood, dan perubahan alokasi kayu hutan alam dan kayu hutan tanaman.



### 3.4.3 Penanganan dan Pengendalian DAS Citarum

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga implementasi penanganan DAS Citarum sebagaimana dimandatkan melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan renaksi percepatan DAS Citarum mengenai adanya perubahan program dan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 8 Mei 2020.

Telah dilaksanakan Reviu Rencana Aksi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019 - 2025 serta adanya usulan mengenai Program air bersih Metropolitan Bandung menjadi bagian rencana aksi PPK DAS Citarum, namun kegiatan ini terhambat karena hampir semua anggaran di K/L yang terlibat dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Beberapa kegiatan akan dilaksanakan sebagai tindaklanjut penanganan dan pengendalian DAS Citarum antara lain akan dilakukan pertemuan pada level teknis guna membahas project prioritas baru dalam pengendalian banjir dan penyediaan air bersih yang perlu disepakati agar menjadi program kegiatan yang konkrit dan pembahasan terkait penyelesaian revisi renaksi dan pengesahan AWP 2021.

### 3.4.4 Pengelolaan Danau Prioritas

Hal yang akan dicapai dari pengelolaan danau prioritas adalah adanya Pengendalian Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Danau Prioritas Nasional, untuk itu akan di keluarkan Rancangan Perpres Danau Prioritas Nasional. Pentingnya penyelamatan danau prioritas nasional melalui Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) untuk menjamin ketersediaan air bersih di Indonesia baik dari sisi kuantitas, kualitas, kontinuitas, maupun aksesibilitas. Pada saat ini proses review masukan K/L terhadap Rancangan Perpres Danau Prioritas oleh Sekretariat Kabinet yang selanjutnya akan di sahkan.

### 3.4.5 Pengendalian Penanganan Sampah Laut

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 tentang Penanganan Sampah Laut dan Rencana Aksi Nasional-nya pada bulan September 2018, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menjadi dirigen untuk memimpin pelaksanaan rencana aksi tersebut. Dalam upaya penanganan sampah laut, Kemenko Marves bekerja sama dengan BPPT dan Indonesia Power melakukan percepatan pembangunan RDF di 10 lokasi dan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sedang dalam tahap penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari.

Telah dilakukan Koordinasi lintas kementerian yang berada di dalam Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut untuk perhitungan formulasi perhitungan sampah laut *land-based* dan *sea-based* dengan kompilasi angka yang didapatkan dari masing - masing K/L dan selanjutnya akan melakukan pemutakhiran data baseline.

### 3.4.6 Kebijakan Carbon Pricing

Kebijakan ini didorong sebagai salah satu opsi mekanisme pembiayaan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Telah disusun Rancangan Peraturan Presiden yang memuat mengenai Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Nilai Ekonomi Karbon ini juga merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Pada saat ini Proses penyampaian penyempurnaan Rperpres pada Presiden dan proses pengesahan RPerpres oleh Presiden, serta fase implementasi Perpres.

## 3.5 Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

### 3.5.1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Tujuan dari kegiatan ini adalah terbentuknya 10 Desa Wisata serta adanya Standar Keselamatan dan Keamanan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, maka Kemenko Marves telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Pembahasan perkembangan Aksesibilitas Darat di Labuan Bajo
- b. Rakor Pembahasan Perkembangan Penyusunan Draft Rancangan Perpres Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara
- c. Rakor Kesiapan KSOP dalam rangka Reaktivasi Wisata Domestik
- d. Rakor Rencana Program Reaktivasi Nasional
- e. Pembahasan KEK Tanjung Api-Api
- f. Telah dilakukan penelaahan MoU dengan PT Mastercard Indonesia
- g. Rapat Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Penyaluran Stimulus BBI
- h. Telah disusun Daftar Usulan Percepatan Pengembangan Pariwisata melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- i. Rakor Optimalisasi Perjalanan Dinas ke Destinasi Wisata Super Prioritas
- j. Kunjungan lapangan persiapan penyelenggaraan Hybrid Meeting Investment Forum dan Peninjauan Lahan untuk *Medical Tourism*
- k. Kunjungan Kerja dalam rangka percepatan Pengembangan DPSP Mandalika
- l. Rapat Persiapan pengiriman Dossier usulan Geopark Nasional menuju UNESCO *Global Geopark*
- m. Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Pariwisata di DPSP Labuan Bajo.

### 3.5.2. Peningkatan Inventarisir Pemberdayaan Informasi Kekayaan Intelektual Parekraf, Khususnya di 5 Destinasi Super Prioritas

Tujuan dari kegiatan ini adalah Sertifikasi Indikasi Geografis, beberapa kegiatan pun telah dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut yaitu:

- a. Rapat Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Perfilman di Indonesia.
- b. Survei Pendaftaran IG Kopi Arabika Toba
- c. Pelaksanaan Webinar "Optimalisasi Fasilitas Indikasi Geografis Kekayaan Intelektual dalam Tatanan Kenormalan Baru"
- d. Bekerja sama dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kekayaan Intelektual terkait Dukungan Percepatan Pendaftaran Indikasi Geografis Kekayaan Intelektual di 5 DPSP dan 15 KEK.

### 3.5.3. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Tujuan dari kegiatan ini adalah adanya Agen Perubahan Aspek Kebersihan dan Sanitasi di 5 DPSP, untuk mendukung hal tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan sepanjang tahun 2020 yaitu :

- a. Rakor Integrasi Program dan Kegiatan K/L dalam Pengembangan Desa Wisata



- b. Pertemuan Penutupan Program Responsive Innovation Fund (RIF) Tahap II Proyek NSLIC/ NSLERED
- c. Pembahasan Usulan Pulau Banda Neira menjadi Kawasan KEK
- d. Rakor dengan pembahasan Bandara Neira menjadi Proyek Strategis Nasional
- e. Rakor Reaktivitas Pariwisata di Banyuwangi
- f. Webinar Reaktivitas Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadapi adaptasi kebiasaan baru







### 3.5.4 Pelatihan Online Kartu Pra Kerja

Pada tahun 2020 telah diselenggarakan pelatihan on line kartu prakerja dan beberapa Rapat Koordinasi yaitu Rakor Riset Pendidikan SDM di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Rakor Pengembangan Inovasi Ekonomi Masyarakat Guna Penciptaan Peluang Usaha Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Wisata. Dan telah digelar kegiatan pembahasan *Capacity Building* Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya akan di lanjutkan pada tahun 2021.

### 3.5.5 Fasilitasi Akses Permodalan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Dalam rangka mendukung kegiatan fasilitasi akses permodalan ini telah di selenggarakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Telah diselenggarakannya Rakor Akses Permodalan UMKM Sektor Parekraf di 4 DPSP
- b. Telah dilaksanakan FGD dengan pembahasan Penggunaan Dana PKBL/CSR untuk Dukungan Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Telah diselenggarakan Coaching Clinic Program PEN Bersama Himbara
- d. Telah dilaksanakan Rakor Sumber Permodalan
- e. Telah dilaksanakan Rakor Pembahasan Sumber Permodalan DPSP Likupang
- f. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Pembahasan Investasi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas
- g. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Time Plan Inventarisasi di 5 DPSP
- h. Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Usulan Kementerian/ Lembaga melalui Program Pemulihan Ekonomi Kreatif Nasional (PEN)
- i. Telah diselenggarakan FGD Sinergi Membangun Kuliner Indonesia di Pasar Mancanegara
- j. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Strategi Kuliner bersama Kemenparekraf
- k. Telah dilaksanakan Rapat Nasional Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Penyaluran Stimulus BBI
- l. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Kolaborasi PaDi UMKM oleh BUMN dalam Gerakan Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI)
- m. Telah dilakukan Fasilitasi penyelesaian Perjanjian Kerahasiaan Data dengan Indonesia *e-Commerce Association* (IdEA)
- n. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Konsep *Food Tour* dan *Street Food Festival*

### 3.6 Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

#### 3.6.1. Kebijakan Pengembangan Perencanaan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha (Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang)

Presiden Joko Widodo memasukkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Semarang ke daftar proyek prioritas strategis. Hal itu tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 telah disusun dokumen naskah kebijakan terkait dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha terkait Investasi Kereta Cepat.

Tindak lanjut selanjutnya adalah Kemenko Marves akan secara rutin melakukan monitoring dan penyelesaian permasalahan lahan yang belum dapat dieksekusi, serta hambatan konstruksi di lapangan dan akan menyusun pertemuan antara delegasi Indonesia dan Tiongkok untuk menyelesaikan 3 (tiga) isu yang berkembang yaitu *Cost Overrun*, Konektivitas, dan Pengendalian Pelaksanaan Proyek serta akan disusun dokumen Kertas Kerja Kebijakan dan Ringkasan Kebijakan terkait Investasi Kereta Cepat.



#### 3.6.2 Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara

Pengembangan hilirisasi tambang diperlukan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan industri manufaktur berbasis mineral. Dengan demikian, proses industrialisasi akan dapat berjalan dengan lebih baik serta memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Pembangunan sektor industri diarahkan menuju hilirisasi dengan alasan, hilirisasi industri adalah merupakan strategi yang tepat untuk negara-negara yang mempunyai sumber daya alam, sumber mineral dan sumber energi yang berlimpah dan dapat menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh sektor ini sebagai input bagi proses industrialisasi. Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Landasan hukum dari Proyek Strategis Nasional adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang direvisi menjadi Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2018. Dan pada tahun 2020 telah dikeluarkan Revisi Perpres tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melingkupi proyek terkait hilirisasi mineral, yaitu Perpres 109 Tahun 2020 tentang Revisi Perpres 3 Tahun 2016 PSN dan Perpres ini sudah ditandatangani Presiden pada tanggal 17 November 2020.



## 3.7 Kesekretariatan

### 3.7.1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Marves Tahun 2020-2024

Penyusunan Renstra Kemenko Marves perlu memperhatikan Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 dan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Janji Presiden dan penugasan lainnya.

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KemenPAN & RB, Kemenko Marves diminta untuk membangun keselerasan dan turunan pohon kinerja (*cascading*) mulai dari Menko hingga individu. Tahun 2020, *cascading target* dari Menko langsung turun ke Deputi tidak terbagi rata 1 (satu) sasaran strategis untuk 1 (satu) Deputi, melainkan terdapat juga 1 (satu) sasaran strategis yang turun ke lebih dari 1 (satu) Deputi. Untuk mengetahui adanya kontribusi unit kerja terhadap sasaran strategis tersebut adanya kontribusi dari semua unit kerja. Untuk mengetahui sasaran strategis tersebut adanya kontribusi dari semua unit kerja Deputi, hal ini akan terlihat atau dijelaskan di manual IKU. Beberapa poin penting dari pembahasan ini antara lain:

1. *SS Customer* Kemenko *cascading* ke *SS Customer* Deputi:
  - a. *Cascading direct*, IKU Kemenko = IKU Deputi
  - b. *Cascading proxy*, IKU Deputi komponen/sub IKU dari Kemenko; atau
  - c. *Cascading indirect*, IKU Kemenko dan IKU Deputi memiliki hubungan kausal.
2. *SS Proses Bisnis Internal* Kemenko *cascading* ke *SS Proses Bisnis Internal* Deputi
  - a. *Cascading proxy*, IKU Deputi komponen/sub IKU dari Kemenko; atau
  - b. *Cascading indirect*, IKU Kemenko dan IKU Deputi memiliki hubungan kausal.
3. *SS L & G* Kemenko *direct cascading* ke *SS Customer* Setmenko
4. Konsep *cascading* sasaran strategis managerial:
  - a. *SS Learning & Growth* Kemenko *direct cascading* ke *SS Stakeholder* Setmenko; atau
  - b. *SS Learning & Growth* Kemenko *direct cascading* ke *SS Customer* Setmenko

Didalam menyusun Renstra, peta strategis perlu difinalkan terlebih dahulu. Peta Strategis Kemenko mencerminkan Tugas dan Fungsi Kemenko Marves sesuai amanat pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2019. Setiap unit kerja bisa memastikan bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan menggambarkan 4 Perspektif baik *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process*, dan *Learning & Growth Perspective* yang dapat diukur target dan pencapaiannya serta mendukung pencapaian Indikator dan target dalam RPJMN 2020-2024. Penetapan peta strategi dan indikator kinerja utama ini juga akan dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja Kemenko Marves oleh MenPAN-RB.

### 3.7.2. Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi

Program Penataan Organisasi Kementerian Negara dan Program Penataan Struktural merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden Joko Widodo, hal ini dilakukan dalam rangka membuat birokrasi yang ramping, efektif dan efisien. Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan antara lain kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi dua level dan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mendukung program Presiden serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka Kemenko Marves perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja dengan ditetapkannya Permenko Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020.

### **3.7.3. Evaluasi dan Reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Tindak lanjut hasil Reviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2018 belum mencapai target 100% ditindak lanjuti karena hanya 1 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 4 rekomendasi yang diberikan (25%). Sedangkan jika menghitung hingga tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Kinerja Kementerian 2019 adalah 0% karena belum ada yang ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2020, Kemenko Marves berkomitmen untuk melakukan penguatan implementasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan target indeks yang ingin dicapai. Komitmen awal ditunjukkan dengan hasil Penilaian Mandiri Pengelolaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memperoleh nilai 86,28% dengan rincian pelaksanaannya dalam 8 (delapan) Area Perubahan yang terdiri dari: 1)Manajemen Perubahan; 2)Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3)Penataan dan Penguatan Organisasi; 4)Penataan Tatalaksana; 5)Penataan Sistem Manajemen SDM; 6)Penguatan Akuntabilitas; 7)Penguata Pengawasan; dan 8)Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

### **3.7.4. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE. Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penyerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Sebagai salahsatu upaya dalam meningkatkan kinerja dalam lingkup Kemenko Marves tahun 2020, telah dilakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengelolaan data, dan pengelolaan sistem informasi. Pengelolaan *database* terdiri dari pengolahan bahan rapat dan pengolahan data persuratan. Pengelolaan aplikasi terdiri dari aplikasi persuratan, aplikasi pendukung layanan prasarana kantor, dan aplikasi monitoring aktifitas unit kerja.

Kendala yang dialami yakni belum tersedianya anggaran yang fokus pada penyelenggaraan SPBE sehingga penyediaan infrastruktur TIK baik dari segi kebijakan, tatakelola dan layanan belum optimal yang berdampak pada tingkat kematangan SPBE. Selain itu, kurangnya SDM juga menjadi kendala dikarenakan sebagian besar diarahkan untuk urusan pendampingan *vidcon*.

Kedepan dibutuhkan adanya tambahan SDM IT yang dapat fokus untuk menyelesaikan tugas dan fungsi sistem informasi. Evaluasi dan reviu setiap satu tahun sekali juga perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem informasi di lingkungan Kemenko Marves.

### **3.7.5. Pengelolaan Keuangan**

Salah satu strategi yang digunakan dalam monitoring dan pembinaan pengelolaan keuangan dan BMN yaitu pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran secara rutin dan terukur serta penguatan forum koordinasi antar pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan unit kerja. Pada tahun 2020, telah dilakukan Pencocokan Data Keuangan dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), dimana merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberi keyakinan pada pelaporan keuangan/kegiatan yang terkait dengan keuangan negara.

Prinsip penerapan PIPK yaitu mendukung pencapaian tujuan organisasi, bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan strategis, sistematis terstruktur dan tepat waktu, mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 6 PMK No. 17 Tahun 2019 tentang PIPK yaitu setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK.

### 3.7.6. Layanan Kepegawaian

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan sosialisasi jabatan fungsional di lingkungan Kemenko Marves dalam rangka mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pada pelayanan informasi dan kehumasan serta memberikan pemahaman baik kepada pejabat yang menjabat pada jabatan administrasi dan fungsional. Penempatan unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan fungsional tersebut agar pelaksanaan kegiatan selaras dengan pengembangan karir selanjutnya.

Selain itu, telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai di lingkup Kemenko Marves. Pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 pasal 1, yang berbunyi "Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa". Jumlah CPNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebanyak 105 orang.

Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/Janji jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional di lingkungan Kemenko Marves merupakan realisasi pelaksanaan perubahan nomenklatur instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan pembinaan karir pejabat fungsional berdasarkan formasi pengadaan CPNS.

### 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 259.596.417.000 disahkan pada tanggal 12 November 2019, dan telah diunggah di DIPA Online Kementerian Keuangan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01-0/2020 serta DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2020. Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi dan Anggaran Kemenko Marves Tahun 2020 per Unit Eselon I

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN FASILITASI</b>		188.271.644.000	175.678.682.126	93,31%
1	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	188.271.644.000	175.678.682.126	93,31%
<b>PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN</b>		71.324.773.000	68.729.900.240	96,36%
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	22.051.166.000	20.755.877.657	94,13%
3	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	10.822.101.000	10.728.983.802	99,14%
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	13.627.286.000	13.246.819.191	97,21%
5	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10.430.203.000	10.189.839.811	97,70%
6	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.800.000.000	7.564.759.203	96,98%
7	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	6.594.017.000	6.243.620.576	94,69%
<b>JUMLAH</b>		<b>259.596.417.000</b>	<b>244.408.582.366</b>	<b>94,15%</b>



Dari tabel terlihat bahwa realisasi keuangan Kemenko Marves sangat baik, karena mendekati 100% dari pagu namun belum memenuhi target (95%). Dari tabel di atas juga nampak bahwa persentase realisasi dari pagu anggaran pada masing-masing unit kerja tidak terlalu jauh perbedaannya. Unit Eselon I dengan nilai persentase realisasi keuangan tertinggi adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (99,14%) lebih tinggi dari rata rata persentase realisasi keuangan 1 (satu) tahun anggaran. Sementara unit dengan nilai persentase realisasi terendah adalah unit Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (93,31%).

Tabel 2. Alokasi dan Realisasi Kemenko Marves TA 2019 per Jenis Belanja

No	Nama Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Proporsi dari total anggaran
1	Belanja Pegawai	57.914.167.000	50.866.358.648	87,83	22,31
2	Belanja Barang	176.187.962.000	169.299.616.897	96,09	67,87
3	Belanja Modal	25.494.288.000	24.242.606.821	95,09	9,82
4	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>259.596.417.000</b>	<b>244.408.582.366</b>	<b>94,15</b>	

Jika dihitung dari Pagu anggaran efektif, maka belanja barang memiliki pagu terbesar yaitu Rp 176.187.962.000 (67,87%); kemudian belanja pegawai sebesar 57.914.167.000 (22,31%) dan yang terkecil belanja modal sebesar 25.494.288.000 (9,82%). Realisasi per jenis belanja yang tertinggi belanja barang sebesar 96,09%; belanja modal 95,09%; dan belanja pegawai sebesar 87,83%.

Grafik 1. Komposisi Alokasi Anggaran  
Komposisi Realisasi Anggaran



Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman Per Kegiatan

KODE	KELUARAN PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	159.352.927.000	147.609.067.285	92,63
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, Persidangan, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat	17.954.467.000	17.472.895.495	97,32
5603	Pengelolaan Hukum, Advokasi, Kerja Sama dan Organisasi	6.430.796.000	6.362.186.530	98,93
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	3.290.000.000	3.084.558.013	93,76
5748	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	1.243.454.000	1.149.974.803	92,48
5605	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	2.689.811.000	2.416.365.323	89,83
5606	Koordinasi Sumber Daya Hayati	96.075.000	95.908.770	99,83
5607	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik	21.088.000	20.977.928	99,48
5608	Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim	1.196.501.000	1.191.614.204	99,59
5749	Koordinasi Kemanan dan Ketahanan Maritim	2.997.410.000	2.844.513.681	94,90
5750	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim	4.008.190.000	3.601.751.511	89,86
5751	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	7.860.741.000	7.439.435.054	94,64
5752	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	3.745.014.000	3.707.626.523	99,00
5753	Koordinasi Sumberdaya Mineral Energi dan Nonkonvensional	321.583.000	321.394.243	99,94
5754	Koordinasi Jasa Kemaritiman	204.598.000	204.595.704	100,00
5755	Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	287.800.000	281.861.530	97,94
5756	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa	569.009.000	559.347.300	98,30
5757	Koordinasi Infrastruktur Pertambangan dan Energi	39.036.000	38.640.600	98,99
5758	Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata	27.480.000	18.433.000	67,08
5759	Koordinasi Industri Penunjang Infrastruktur	849.879.000	846.110.988	99,56
5760	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur	5.616.889.000	5.517.260.551	98,23
5761	Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim	1.097.681.000	1.096.517.899	99,89
5762	Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari	331.703.000	330.989.800	99,78

Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman Per Kegiatan

KODE	KELUARAN PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
5763	Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim	21.874.000	21.665.488	99,05
5764	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim	2.366.515.000	2.341.406.102	98,94
5985	Koordinasi Energi	750.000.000	746.185.565	99,49
5986	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	1.312.094.000	1.310.396.686	99,87
5987	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.469.692.000	1.463.869.391	99,60
5988	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	1.553.209.000	1.545.252.271	99,49
5989	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	1.245.923.000	1.221.214.696	98,02
5990	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2.531.494.000	2.522.068.779	99,63
5991	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1.230.624.000	1.203.074.432	97,76
5992	Koordinasi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air	1.044.844.000	1.041.991.532	99,73
5993	Koordinasi Infrastruktur Pengembangan Wilayah	885.178.000	879.043.686	99,31
5994	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas	856.649.000	773.193.646	90,26
5995	Koordinasi Industri Maritim dan Transportasi	1.089.160.000	1.054.187.880	96,79
5996	Koordinasi Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan	960.000.000	887.356.880	92,43
5997	Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	760.000.000	729.508.977	95,99
5998	Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.210.000.000	1.086.564.997	89,80
5999	Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	960.000.000	917.541.125	95,58
6000	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	3.663.012.000	3.614.816.001	98,68
6001	Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	1.060.000.000	1.028.837.718	97,06
6002	Koordinasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	1.640.000.000	1.617.539.240	98,63
6003	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	890.000.000	853.410.487	95,89
6004	Koordinasi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	890.000.000	848.980.092	95,39
6005	Koordinasi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	890.000.000	874.541.799	98,26
6006	Koordinasi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	890.000.000	842.263.963	94,64
6007	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang	2.600.000.000	2.528.023.622	97,23



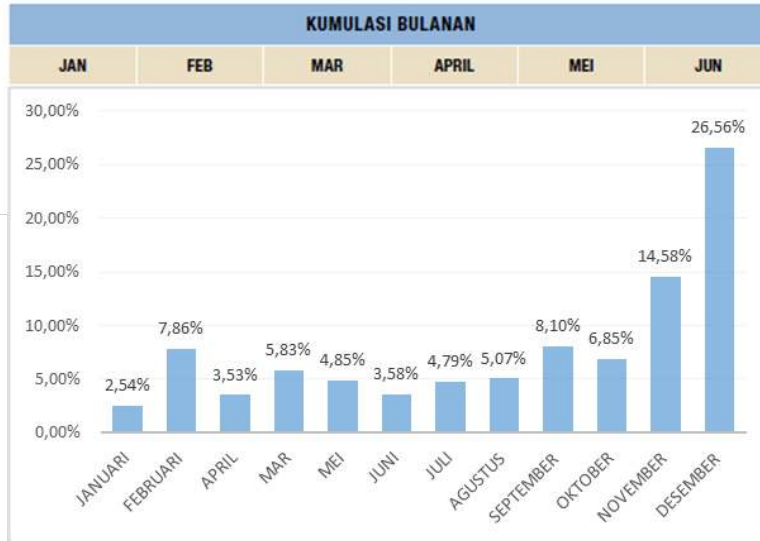
Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman Per Kegiatan

KODE	KELUARAN PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
	Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
6008	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	950.000.000	864.127.489	90,96
6009	Koordinasi Investasi Bidang Jasa	750.000.000	695.929.570	92,79
6010	Koordinasi Investasi Strategis	900.000.000	879.797.855	97,76
6011	Koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	1.000.000.000	907.411.138	90,74
6012	Koordinasi Pertambangan	800.000.000	744.625.654	93,08
6013	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	2.194.017.000	2.151.728.870	98,07
<b>JUMLAH</b>		<b>259.596.417.000</b>	<b>244.408.582.366</b>	<b>94,15</b>

Dari tabel di atas juga tergambar bahwa persentase realisasi anggaran antar unit kerja tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada kegiatan Koordinasi Jasa Kemaritiman yaitu sebesar 100%.



Tabel 4. Realisasi Anggaran/Bulan TA. 2019



Dari grafik di atas, terlihat perbedaan realisasi anggaran per bulan antara T.A 2020 dengan T.A 2019. Pada tahun 2019 terlihat realisasi anggaran lebih baik dan merata, sedangkan pada tahun 2020 terjadi lonjakan cukup tinggi pada bulan Desember. Realisasi anggaran tahun 2020 juga terlihat bahwa realisasi pada bulan Desember merupakan realisasi anggaran tertinggi. Hal ini terjadi karena dampak dari Pandemi Covid-19 mulai bulan Maret dan perubahan SOTK baru.

Melalui nilai realisasi bulanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat nilai dan grafik realisasi secara kumulatif yaitu sebagai berikut:







Tabel 5. Realisasi Anggaran Kumulasi TA. 2020

<b>JANUARI</b>	<b>FEBRUARI</b>	<b>MARET</b>	<b>APRIL</b>	<b>MEI</b>	<b>JUNI</b>
6.594.150.126	20.413.346.422	15.138.228.455	9.172.356.707	12.601.181.158	9.285.257.247
<b>JULI</b>	<b>AGUSTUS</b>	<b>SEPTEMBER</b>	<b>OKTOBER</b>	<b>NOVEMBER</b>	<b>DESEMBER</b>
12.421.997.336	13.162.166.153	21.035.312.627	17.790.743.230	37.837.098.015	68.956.744.890





## **BAB IV BUDAYA KERJA**

**Likupang - Sulawesi Utara**  
Foto : HUMAS Kemenko Marves

Kemenko Marves telah merumuskan Budaya Kerja **PATEN** sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan organisasi yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas organisasi. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi.

Nilai-nilai budaya kerja PATEN yaitu sebagai berikut:



## NILAI - NILAI BUDAYA KERJA PATEN







# DO - DONT MARVES









<b>PASSION</b>	Selalu memberikan hasil kerja terbaik dan terus meningkatkan keahlian	Tekad untuk mencapai kesempurnaan	Tekad untuk melakukan yang terbaik
<b>DO'S</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selalu melakukan perbaikan diri dan tim secara terus menerus tanpa diminta</li> <li>Responsif terhadap customer internal dan eksternal</li> <li>Menetapkan standar tinggi sebagai indikator keberhasilan bekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memotivasi diri sendiri dan tim</li> <li>Tekad memperbaiki diri sendiri dan tim secara terus menerus</li> <li>Bekerja dengan tepat proses, tepat waktu dan mencapai target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai target</li> <li>Berorientasi memberikan kontribusi terbaik untuk stakeholder</li> </ul>
<b>DON'T</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan waktu kerja untuk kegiatan non produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersikap acuh pada pencapaian standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersikap acuh dan pesimis terhadap target</li> </ul>

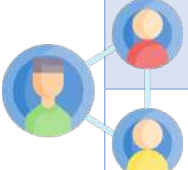




<b>ACCOUNTABLE</b>	Kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan.
<b>DO'S</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja terencana, transparan, dan terukur</li> <li>Melaporkan hasil kerja tepat waktu</li> <li>Bertanggung jawab terhadap hasil kerja</li> <li>Bekerjasama guna meningkatkan mutu hasil kerja</li> <li>Menerima berbagai masukan yang mendukung untuk melaksanakan pekerjaan</li> </ul>
<b>DON'T</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja diluar rencana kerja yang telah ditetapkan</li> <li>Pelaporan hasil kerja tidak tepat waktu</li> <li>Rendahnya tanggung jawab atas hasil kerja</li> <li>Tidak terjalin kerja sama yang harmonis dalam melaksanakan pekerjaan</li> <li>Tertutup terhadap masukan</li> </ul>



<b>TEAMWORK</b>	Menyadari bahwa setiap orang/individu memiliki kontribusi dan peran yang penting dalam bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama.
 <p><b>DO'S</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling percaya</li> <li>• Terbuka (open minded)</li> <li>• Saling menghargai</li> <li>• Kompetensi/optimalkan potensi</li> <li>• Solutif terhadap permasalahan</li> <li>• Saling mengisi kekurangan/berbagi</li> </ul>
<p><b>DON'T</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curiga/berprasangka</li> <li>• Tertutup/merasa paling benar</li> <li>• Meremehkan orang lain</li> <li>• Pasif/merasa tidak penting</li> </ul>

<b>EFFICIENT DAN EFFECTIVE</b>	Berorientasi pada hasil yang maksimal dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
 <p><b>DO'S</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun perencanaan program kerja yang selaras dengan visi dan menghindari tumpang tindih</li> <li>• Taat prosedur dan menjaga kualitas dalam mengelola pekerjaan</li> <li>• Melaksanakan program yang tepat waktu, tepat anggaran dan tepat sasaran</li> <li>• Melaksanakan Monev secara berkala</li> <li>• Berperilaku hormat dalam penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu, sarana)</li> </ul>
<p><b>DON'T</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersulit proses penyelesaian pekerjaan yang sesungguhnya bisa dipermudah</li> <li>• Pengambilan keputusan yang terburu-buru tanpa pertimbangan yang seksama</li> <li>• Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun</li> <li>• Mengerjakan rutinitas tanpa pengendalian</li> <li>• Berperilaku boros dalam penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu, sarana)</li> </ul>

<b>NETWORKING</b>	Selalu membangun hubungan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan kesuksesan organisasi
 <p><b>DO'S</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengembangkan komunikasi dengan Stakeholder</li> <li>• Mampu membangun koneksi/jejaring baik nasional maupun internasional</li> <li>• Terus aktif mencari peluang</li> </ul>
<p><b>DON'T</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statis dalam berkomunikasi</li> <li>• Membangun komunikasi hanya disaat membutuhkan</li> <li>• Tidak mengembangkan jaringan dan merasa cukup dengan yang sudah ada</li> </ul>



## **BAB V PENUTUP**

**Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur**

Foto : Willian Kusno dari Unsplash





Laporan kegiatan Tahun 2020 ini disusun berdasarkan realisasi kegiatan program prioritas tahun anggaran 2020 yang telah disusun oleh Kemenko Marves. Laporan yang berisikan informasi kegiatan Kemenko Marves selama Tahun 2020 sebagai media informasi dan komunikasi untuk lebih mengenalkan segala bentuk aktivitas Kemenko Marves, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh komunikasi yang baik dan kerja sama terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi dengan berbagai pihak.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kegiatan di Kemenko Marves selama tahun 2020 adalah:

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik yang terlihat dari pencapaian target masing-masing kegiatan, namun demikian, capaian perlu didorong untuk sampai kepada level outcome sehingga manfaat pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka Panjang.
2. Beberapa kegiatan masih perlu dikuatkan dalam perencanaannya agar intervensi yang dilakukan Kemenko benar-benar dapat menciptakan akselerasi pencapaian target pembangunan di bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Walaupun tahun 2020 dihadapkan pada kondisi pandemi covid 19, realisasi anggaran Kemenko Marves pada TA. 2020 mencapai 94,15%, beberapa pelaksanaan kegiatan program prioritas sebagian besar dilaksanakan secara *virtual meeting* namun hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Kemenko Marves.

Sedangkan untuk perbaikan di masa mendatang, maka langkah-langkah yang dapat kedepan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan pemahaman terkait outcome dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, terkait hal ini, Sekretariat Kemenko hendaknya terus melakukan peningkatan kapasitas pemahaman outcome
2. Memperkuat koordinasi awal dengan K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves untuk menajamkan identifikasi terhadap isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi yang akan dikoordinasikan, sehingga perencanaan kegiatan dapat dikuatkan dan intervensi yang dilakukan dapat berjalan maksimal;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami bahwa setiap pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kegiatan merupakan proses penyusunan kebijakan, terkait hal ini, Sekretariat Kemenko agar melaksanakan peningkatan kapasitas terkait kebijakan
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dukungan kesekretariatan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, terkait ini integrasi sistem aplikasi sangat penting dilakukan.



5. Penguatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk terus memberikan solusi secara cepat terhadap kendala yang dihadapi.

**M**elalui laporan ini, diharapkan bisa menjadi umpan balik dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan kinerja dapat berjalan dengan baik. Melalui laporan kegiatan yang baik, diharapkan Kemenko Marves dapat merealisasikan sasaran dan target kebijakan program prioritas yang sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Sehingga tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Marves. Semoga







Scan Me



DISUSUN OLEH :

**BIRO PERENCANAAN, KEMENKO MARVES**

Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 - Indonesia

Telp : +62 21 23951100

Email : [kemenkomaritim@maritim.go.id](mailto:kemenkomaritim@maritim.go.id)

[maritim.go.id](http://maritim.go.id)



@Kemenkomarves



@Kemenkomarves



Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi



Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI